



**ANALISIS MODEL PEMILIHAN METODE
PEMBEBANAN PAJAK PENGHASILAN**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program Strata Dua (S-2) Magister Akuntansi**

**Oleh
SLAMET WAHYUDI
NIM : 2010950012**

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2014**

ANALISIS MODEL PEMILIHAN METODE PEMBEBANAN PAJAK PENGHASILAN

TESIS

Tesis telah diujikan pada:

Jakarta, 1 September 2014



Prof. Dr. Suhendar Sulaeman, M. S
Penguji I



Dr. Siti Hamidah Rustiana, SE., M. Si
Penguji II



Dr. Waluyo, SE., Ak., M.Sc
Penguji III

Lembar Pernyataan Orisinilitas

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (magister atau doctor) di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing / Tim Promotor dan masukan dari Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak dapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 25 Agustus 2014

Yang Membuat Pernyataan,


Slamet Wahyudi

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan sebuah Sistem Pendukung Keputusan dengan multi kriteria, yang digunakan di bidang akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan prioritas metode pembebanan pajak penghasilan dengan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP).

Hasil penelitian terhadap kriteria penilaian *balancesheet approach* dan *income statements approach*, dengan alternatif-alternatif yang di pertimbangkan adalah: (1) aset-liabilitas; (2) tanggihan; (3) bersih dari pajak; (4) alokasi parsial; (5) alokasi intra periode; dan (6) non-alokasi. Menunjukkan bahwa prioritas utama pemilihan metode pembebanan pajak penghasilan adalah dengan metode aset-liabilitas.

Kata kunci: AHP, *balancesheet approach*, *income statements approach*, aset-liabilitas, tanggihan, bersih dari pajak, alokasi parsial, intra periode, non-alokasi.

ABSTRACT

This study is a Decision Support System (DSS) with multi-criteria, which is used in accountancy. This research aims to determine the priority of income tax payments method using the method of Analytic Hierarchy Process (AHP).

A research is conducted the assessments criteria are balancesheet approach and income statements approach, with assumed that considers these alternatives : (1) asset-liabilities; (2) deffered; (3) net-of-tax; (4) partial allocation; (5) intra period; (6) non allocation. The result shows that priority prefer of income tax payments method is asset-liabilities method.

Keywords: AHP, balancesheet approach, income statements approach, asset-liabilities, deffered, net-of-tax, partial allocation, intra period, non allocation.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT, tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tesis ini disusun untuk mendapatkan gelar akademik Magister Akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Keberhasilan penulis menyelesaikan tesis ini tak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Atas bantuan tersebut penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Suhendar Sulaeman, MS. Selaku Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta dan sebagai pembimbing utama yang telah banyak meluangkan waktu dan dengan sabar membimbing penulis.
2. Ibu Dr. Siti Hamidah Rustiana, SE.,M.Si., Ak. Selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta dan sebagai pembimbing kedua yang telah banyak memberikan masukan dan arahan untuk kesempurnaan tesis ini.
3. Pimpinan dan segenap civitas akademika Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang terus memberikan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dalam dunia pendidikan.
4. Kedua orang tua dan keluarga yang tiada henti berdoa dan memberikkan semangat serta dukungan dalam segala bentuk untuk kesuksesan penulis.
5. Para dosen, teman-teman kuliah dan semua pihak yang telah banyak membantu baik materil maupun spirituil sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang terbaik. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih perlu penyempurnaan. Untuk itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan karya ini. Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 25 Agustus 2014

Penulis

Slamet Wahyudi



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan, Manfaat dan Sasaran.....	5
1.3.1. Tujuan Penelitian	5
1.3.2. Manfaat Penelitian	5
1.3.3. Sasaran Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Definisi Pajak Penghasilan (PPh)	7
2.2. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan	8
2.3. Metode-metode Pembebanan Pajak Penghasilan	12
2.3.1. Metode Aset-Liabilitas (<i>Assets-Liabilities</i>)	15
2.3.2. Metode Tanggahan (<i>Deferred</i>)	16
2.3.3. Metode Bersih dari Pajak (<i>Net-of-Tax</i>)	17
2.3.4. Metode Alokasi Parsial (<i>Partial Allocation</i>)	19
2.3.5. Metode Alokasi Intra Periode (<i>Intra Period</i>)	19
2.3.6. Metode Non-Alokasi (<i>Non Allocation</i>)	20
2.4. Kegunaan-Keputusan Informasi Akuntansi	22
2.5. Tinjauan Penelitian Sebelumnya	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
3.1. Metode Penelitian	37

3.2. Jenis dan Sumber Data	37
3.3. Prinsip Kerja	38
3.4. Metode Analisis	40
3.4.1. Persamaan Matematik	51
3.4.2. Aksioma-aksioma AHP	53
3.5. Lokasi dan Waktu Penelitian	55
3.6. Organisasi Penelitian	55
BAB IV PEMBAHASAN	56
4.1. Analisis Prioritas Kriteria dan Faktor-faktor dalam Pemilihan Metode Pembebanan Pajak Penghasilan (PPh) ..	56
4.1.1. Perhitungan Faktor Pembobotan Hirarki untuk Semua Kriteria	51
4.1.2. Vektor Prioritas	62
4.1.3. Perhitungan Faktor Evaluasi untuk Kriteria <i>Balancesheet Approach</i>	64
4.1.4. Perhitungan Faktor Evaluasi untuk Kriteria <i>Income Statement Approach</i>	67
4.1.5. Perhitungan Total Rangking/Prioritas Global	69
4.1.5.1. Faktor Evaluasi Total	69
4.1.5.2. Total Rangking	70
4.1.5.3. Prioritas Metode Pembebanan PPh	72
4.1.6. Perhitungan Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode-metode Pembebanan Pajak Penghasilan	73
4.1.6.1. Perhitungan Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Aset-Liabilitas	73
4.1.6.2. Perhitungan Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Tangguhan	77
4.1.6.3. Perhitungan Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Bersih dari Pajak	80
4.1.6.4. Perhitungan Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Alokasi Parsial	83
4.1.6.5. Perhitungan Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Alokasi Intra Periode	87
4.1.6.6. Perhitungan Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Non Alokasi	91

	4.2. Pemilihan Metode Pembebanan Pajak Penghasilan (PPh) Mengoptimalkan Kegunaan Laporan Keuangan	95
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	100
	5.1. Kesimpulan	100
	5.2. Saran	101
	DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Perhitungan Pajak Penghasilan atas Dasar Pembukuan.....	9
Tabel 2.2. Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi Komersil dan Laba Rugi-Fiskal	10
Tabel 2.3. Rekonsiliasi Akuntansi Pajak Penghasilan	12
Tabel 2.4. Penelitian-penelitian Sebelumnya	28
Tabel 3.1. Keunggulan AHP	42
Tabel 3.2. Skala Penilaian Perbandingan	46
Tabel 3.3. Nilai Indeks Random	49
Tabel 4.1. Perbandingan Metode-Metode Pembebanan PPh: Efek terhadap Penyajian Laporan Keuangan	57
Tabel 4.2. Ilustrasi Perbedaan Enam Metode Alokasi Pembebanan PPh dalam Penyajian Laporan Laba Rugi dan Laporan Posisi Keuangan	59
Tabel 4.3. Matriks Faktor Pembobotan Hirarki untuk Semua Kriteria	60
Tabel 4.4. Matriks Faktor Pembobotan Hirarki untuk Semua Kriteria yang disederhanakan	61
Tabel 4.5. Matriks Faktor Pembobotan Hirarki untuk Semua Kriteria yang dinormalkan	61
Tabel 4.6. Matriks Vektor Prioritas	62
Tabel 4.7. Matriks Faktor Evaluasi untuk Kriteria <i>Balancesheet Approach</i>	64
Tabel 4.8. Matriks Faktor Pembobotan Hirarki untuk <i>Balancesheet Approach</i> yang disederhanakan	65
Tabel 4.9. Matriks Faktor Pembobotan Hirarki untuk <i>Balancesheet Approach</i> yang dinormalkan	65
Tabel 4.10. Matriks Faktor Evaluasi untuk Kriteria <i>Income Statement Approach</i>	67
Tabel 4.11. Matriks Faktor Pembobotan Hirarki untuk <i>Income Statement Approach</i> yang disederhanakan	67
Tabel 4.12. Matriks Faktor Pembobotan Hirarki untuk <i>Income Statement Approach</i> yang dinormalkan	68
Tabel 4.13. Matriks Hubungan antara Kriteria dengan Alternatif	69

Tabel 4.14. Total Ranging untuk Metode Aset-Liabilitas	70
Tabel 4.15. Total Ranging untuk Metode Tangguhan	70
Tabel 4.16. Total Ranging untuk Metode Bersih dari Pajak	71
Tabel 4.17. Total Ranging untuk Metode Alokasi Parsial	71
Tabel 4.18. Total Ranging untuk Metode Alokasi Intra Periode	71
Tabel 4.19. Total Ranging untuk Metode Alokasi Non Alokasi	71
Tabel 4.20. Urutan Prioritas Metode Pembebanan Pajak Penghasilan	72
Tabel 4.21. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Aset-Liabilitas	74
Tabel 4.22. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Aset-Liabilitas yang disederhanakan	74
Tabel 4.23. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Aset-Liabilitas yang dinormalkan	75
Tabel 4.24. Urutan Prioritas Sub Alternatif Metode Aset-Liabilitas	76
Tabel 4.25. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Tangguhan	77
Tabel 4.26. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Tangguhan yang disederhanakan	78
Tabel 4.27. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Tangguhan yang dinormalkan	79
Tabel 4.28. Urutan Prioritas Sub Alternatif Metode Tangguhan	80
Tabel 4.29. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Bersih dari Pajak	81
Tabel 4.30. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Bersih dari Pajak yang disederhanakan	81
Tabel 4.31. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Bersih dari Pajak yang dinormalkan	82
Tabel 4.32. Urutan Prioritas Sub Alternatif Metode Bersih dari Pajak	83
Tabel 4.33. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Alokasi Parsial	84
Tabel 4.34. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Alokasi Parsial yang disederhanakan	84
Tabel 4.35. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Alokasi Parsial yang dinormalkan	85
Tabel 4.36. Urutan Prioritas Sub Alternatif Metode Alokasi Parsial	86
Tabel 4.37. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif	

Metode Alokasi Intra Periode	87
Tabel 4.38. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Alokasi Intra Periode yang disederhanakan	88
Tabel 4.39. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Alokasi Intra Periode yang dinormalkan.....	89
Tabel 4.40. Urutan Prioritas Sub Alternatif Metode Alokasi Intra Periode.....	90
Tabel 4.41. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Non Alokasi	91
Tabel 4.42. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Non Alokasi yang disederhanakan	92
Tabel 4.43. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Non Alokasi yang dinormalkan.....	93
Tabel 4.44. Urutan Prioritas Sub Alternatif Metode Non Alokasi	94

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Metode-metode Pembebanan Pajak Penghasilan	15
Gambar 2.2. Metode Pembebanan PPh dan Penyajian Laporan Keuangan ...	22
Gambar 2.3. Fitur Teori Kegunaan-Keputusan Akuntansi Bagi Investor	23
Gambar 3.1. Alur Pikir Model Pembebanan Pajak Penghasilan	39
Gambar 3.2. Bagan Alir Proses Metode AHP	43
Gambar 3.3. Bagan Alir Proses Mencari Vektor Eigen Pada Metode AHP ...	44
Gambar 3.4. Bagan Alir Proses Uji/Cek Konsistensi Pada Metode AHP	44
Gambar 3.5. Bagan Alir Proses Autokoreksi Pada Metode AHP	45



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 1975 Kongres Amerika Serikat memerintahkan *Securities Exchange Commission (SEC)* untuk mengatur metode akuntansi yang sama bagi perusahaan-perusahaan tambang minyak yang *go-public* di *New York Stock Exchange (NYSE)*. Pilihan tersebut berkisar pada dua metode yang telah umum diterapkan pada perusahaan-perusahaan tersebut, yaitu *successful efforts costing* dan *full costing*.

Pada tahun 1977, *SFAS 19* mengadopsi metode *successful efforts costing*. Perusahaan-perusahaan produsen minyak dan gas kecil memprotes keras kebijakan tersebut. Hal itu mengingat dengan penerapan metode alternatif *successful effort*, yaitu *full costing*, maka total aset perusahaan pada skala tersebut akan menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, bagi perusahaan-perusahaan produsen minyak dan gas besar, metode *successful efforts* dipandang lebih cocok karena menghemat pembayaran pajak. Untuk mengakomodir kedua kepentingan tersebut, *SEC* pada tahun 1978 mengeluarkan *Accounting Series Release 253* yang memperkenalkan *reserve recognition accounting*. Hal itu berarti bahwa pada akhirnya *SEC* bersikap mengakomodir kedua metode pengakuan yang telah diterapkan secara umum dan mewakili kepentingan masing-masing entitas bisnis tersebut (Zeff, 2003:10).

Upaya pengelolaan laba dapat dilakukan karena adanya perbedaan dalam perhitungan depresiasi antar pajak dan akuntansi yang berbasis akrual (Dubar dkk, 2004:19). Penyajian kembali laporan keuangan dimaksudkan untuk menghindari

tuntutan pajak, walaupun hal ini berasosiasi negatif dengan nilai pasar dan non pasar (Kamran dan Goodwin, 2007:47). Dengan menggunakan komponen-komponen dalam laporan keuangan, perusahaan multinasional dapat menghindari pajak (Rego, 2003:55). Metode-metode pembebanan pajak penghasilan yang paling tepat dapat mengurangi dampak dari keterbatasan konservatisme yang diikuti dalam rangka penyajian laporan keuangan terhadap efektifitas hasil dari analisis finansial (Givoly dan Hayn, 2002:58).

Konsekuensi dari pembebanan PPh dalam laporan keuangan menimbulkan masalah karena adanya perbedaan dalam kaidah penyajian pembukuan menurut ketentuan pajak dan akuntansi menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Ada dua pendekatan dalam pelaporan konsekuensi PPh dalam laporan keuangan, yaitu *balance sheet approach* dan *income statement approach* (Hendriksen, 1992:5). Kedua pendekatan tersebut kemudian dirinci oleh Kieso dan Weygant (2003:10) menjadi 6 (enam) metode, yaitu (1) alokasi komprehensif antar periode aset-laibilitas (*assets-liabilities*), (2) bersih dari pajak (*net-of-tax*), (3) tangguhan (*deferred*), (4) alokasi komprehensif intra periode, (5) alokasi parsial dan (6) non alokasi.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Direktorat Jenderal Pajak saat ini lebih merekomendasikan metode alokasi komprehensif PPh dengan pendekatan aset-laibilitas, sebagaimana terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46. Dalam wacana akuntansi perpajakan sebenarnya terdapat metode alokasi dan non alokasi yang masing-masing memiliki konsekuensi ekonomi dari daya guna laporan keuangan

sebagai akibat pengungkapan konsekuensi penerapan beberapa metode pajak penghasilan.

American Principles Board (APB) pada tahun 1967 telah memelopori standar akuntansi yang memandu pelaporan konsekuensi Pajak Penghasilan dalam laporan keuangan, yaitu *APB Opinion* No. 11 tentang *Accounting for Income Tax* yang menggunakan pendekatan metode tangguhan. Kemudian pada tahun 1987, *APB* yang berubah menjadi *Financial Accounting Standards Board (FASB)* menerbitkan *SFAS* No. 96, pernyataan tersebut kemudian diperbarui dengan *SFAS* No. 109 tentang *Accounting for Income Tax* pada tahun 1992. Tetapi pernyataan terakhir *FASB* tersebut menggunakan pendekatan metode yang berbeda dengan *APB Opinion* No. 11, yaitu aset-libilitas.

Berturut-turut pernyataan standar akuntansi serupa juga dikeluarkan oleh *International Accounting Standards Committee (IASC)*, yaitu *IAS* No. 12 (Revisi) tentang *Accounting for Income Tax* pada tahun 1997 dan oleh DSAK IAI di Indonesia melalui PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan pada tahun 1997. PSAK No. 46 berlaku efektif bagi perusahaan yang *go-public* untuk laporan keuangan setelah tanggal 1 Januari 1999. PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan merupakan hasil adopsi dari pernyataan serupa yang pernah dinyatakan oleh *FASB* di Amerika Serikat (yaitu *SFAS* No. 109 tentang *Accounting for Income Tax*) dan oleh *IASC* dalam pernyataan internasional (yaitu *IAS* No. 12 (Revisi) tentang *Accounting for Income Tax*). *IAS* No. 12 (Revisi) tersebut telah diadopsi oleh *IASB (International Accounting Standards Board)* sebagai *IFRS (International Financial Reporting Standards)* dalam makna luas

sehingga tetap berlaku walaupun terjadi konvergensi standar akuntansi internasional menjadi *IFRS*.

Kebijakan akuntansi berpotensi dalam mempengaruhi keputusan riil manajemen, termasuk keputusan untuk mengintervensi suatu standar akuntansi. Konsekuensi ekonomi sebagai dampak pelaporan akuntansi dalam perilaku pengambilan keputusan bisnis, pemerintahan (dalam penentuan jumlah pajak) dan kreditur (*Zeff, 1978:2*).

Esensi dari definisi ini adalah laporan akuntansi dapat mempengaruhi keputusan riil yang dibuat manajer dan mencerminkan keinginannya. Menurut politik ekonomi, akuntansi secara eksplisit menyatakan bahwa alternatif sistem pelaporan keuangan (misalnya antara yang diregulasi melawan yang tidak) memiliki konsekuensi sosial, yaitu dalam suatu sistem beberapa orang akan merasa lebih baik saat yang lain merasakan sebaliknya, sehingga sistem seperti terpolitisasi sebagai suatu perilaku ekonomi (*Kiswara, 2009:6*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka diperlukan kajian ini, yaitu untuk menganalisis model pemilihan metode pembebanan pajak penghasilan yang paling baik untuk tujuan penyajian laporan keuangan, dalam konteks kewajiban pajak yang melekat pada wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap. Penelitian ini kami beri judul **"ANALISIS MODEL PEMILIHAN METODE PEMBEBANAN PAJAK PENGHASILAN"**.

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian ini disusun berdasarkan latar belakang teoritis dan perkembangan riset sebelumnya serta fenomena yang terjadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menentukan prioritas kriteria dan faktor-faktor dalam memilih metode pembebanan pajak penghasilan yang tepat?
2. Bagaimana memilih metode pembebanan pajak penghasilan untuk mengoptimalkan kegunaan laporan keuangan?

1.3. Tujuan, Manfaat dan Sasaran

1.3.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan yang akan dicapai, untuk:

1. Menganalisis prioritas kriteria dan faktor-faktor dalam memilih metode pembebanan pajak penghasilan yang tepat.
2. Menganalisis metode pembebanan pajak penghasilan untuk mengoptimalkan kegunaan laporan keuangan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Bahan pertimbangan atas dasar penelaahan ilmiah bagi regulator pajak dan penyusun standar akuntansi atas konsekuensi ekonomi dari daya guna laporan keuangan sebagai akibat pengungkapan konsekuensi penerapan beberapa metode pajak penghasilan.

2. Bahan evaluasi terhadap penerapan akuntansi pajak penghasilan dengan pendekatan aset-liabilitas yang direkomendasikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.
3. Bahan kajian dalam penyusunan reformasi aturan pajak yang berkaitan dengan penerapan akuntansi pajak penghasilan bagi regulator pajak.
4. Bahan evaluasi terhadap konsistensi dan relevansi *bound of judgement* bagi penyusun standar akuntansi yang bersifat normatif.
5. Sajian hasil analisis atas metode-metode pembebanan pajak penghasilan yang didukung oleh teori *analytical hierarchy process* dalam kerangka konseptual pengakuan dan pengungkapan pelaporan keuangan.

1.3.3. Sasaran Penelitian

Sasaran yang akan dicapai pada penelitian ini adalah diketahuinya metode pembebanan pajak penghasilan yang paling optimal untuk dikembangkan sebagai alternatif model bagi pengguna laporan keuangan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan adalah

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan, penghasilan merupakan

“Kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.”

Menurut pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, biaya fiskal adalah “biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan”

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan, beban (*expense*) adalah “sebagai upaya yang secara langsung menghasilkan pendapatan dalam suatu periode atau yang sudah tidak memberi manfaat ekonomi di masa berikutnya”

Perbedaan definitif di atas mengakibatkan adanya perlakuan yang berbeda dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh). Sebagai akibatnya aturan pajak mensyaratkan adanya prosedur rekonsiliasi laporan keuangan terhadap ketentuan pajak mengenai pembukuan guna menghitung penghasilan kena pajak. Hal ini senada dengan salah satu pendekatan yang diungkapkan oleh kelompok kerja standar akuntansi *OECD (Organization for Economic Cooperation and*

Development), dalam laporan seri harmonisasi standar akuntansi. Hal itu merupakan solusi beda antara akuntansi dan ketentuan pajak. Dalam SK Dirjen Pajak No. Kep.214/PJ/2001 dinyatakan bahwa rekonsiliasi laba rugi fiskal termasuk keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan.

2.2. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

“Pembukuan merupakan proses pencatatan untuk mengumpulkan informasi mengenai pajak yang terutang maupun tidak dan ditutup dengan penyusunan laporan keuangan pada setiap akhir tahun pajak “.

Dalam kaitan dengan laibilitas PPh badan dan bentuk usaha tetap, maka mekanisme akuntansi perpajakan wajib pajak nampak lebih kompleks. Hal ini mengingat adanya beberapa *treatment* kebijakan akuntansi yang diperhitungkan dalam prosedur penghitungan pajak terutang. Kebijakan tersebut seperti depresiasi dan amortisasi aset tetap, sistem penilaian persediaan barang dan asas pembukuan, untuk mengakui saat pajak terutang. Jadi tujuan pembukuan adalah agar wajib pajak dapat menghitung besarnya pajak yang terutang.

Tabel 2.1. Perhitungan Pajak Penghasilan atas Dasar Pembukuan.

Jumlah seluruh penghasilan	XX.XXX,-
Penghasilan yang bukan objek pajak	(XX.XXX,-)
Penghasilan bruto	XX.XXX,-
Biaya fiskal	(XX.XXX,-)
Koreksi biaya fiskal	XX.XXX,-
Penghasilan neto	XX.XXX,-
Kompensasi kerugian (bila ada)	(XX.XXX,-)
Penghasilan kena pajak	XX.XXX,-
Tarif%
PPh	XX.XXX,-
Kredit pajak	(XX.XXX,-)
PPh lebih / Kurang / Nihil	XX.XXX,-

Sumber: Kiswara (2009:50).

Rekonsiliasi fiskal merupakan mekanisme teknis yang dilakukan oleh wajib pajak ketika menghitung PPh menggunakan basis pembukuan. Rekonsiliasi fiskal menyangdingkan antara laporan laba rugi komersil (yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan) dengan perhitungan penghasilan kena pajak (atas dasar pembukuan pajak). Hal ini ditempuh mengingat terdapat perbedaan konsep pengakuan, penilaian, dan pengungkapan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan pajak mengenai pembukuan. Selanjutnya hasil dari rekonsiliasi fiskal adalah perincian penyesuaian fiskal positif dan negatif, serta perbedaan tetap dan perbedaan temporer/waktu.

Dalam rangka rekonsiliasi fiskal guna menghitung laba kena pajak, maka dikenal istilah penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif. Penyesuaian fiskal positif terjadi apabila terdapat komponen penghasilan dalam rangka perhitungan PPh yang belum diperhitungkan dalam penghasilan komersil, jadi penyesuaian fiskal positif terhadap penghasilan terjadi bila mengakibatkan penghasilan komersil bertambah. Dan untuk komponen biaya, maka penyesuaian fiskal positif terjadi apabila komponen biaya dalam perhitungan komersil

berkurang, sebagai akibat tidak diperkenalkannya suatu jenis biaya tertentu diperhitungkan sebagai biaya fiskal dalam perhitungan PPh. Adapun penyesuaian fiskal negatif atas penghasilan dan biaya adalah kebalikan dari pengertian penyesuaian fiskal positif dalam rangka perhitungan PPh, yaitu bila penghasilan komersil berkurang namun untuk komponen biaya apabila bertambah.

Tabel 2.2. Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi Komersil dan Laba Rugi Fiskal

No.	Akun	Saldo Komersil	Penyesuaian Fiskal		Saldo Fiskal
			Positif	Negatif	
1.	Penghasilan	xxx,-		xxx,-	xxx,-
2.	Gaji, upah, honor dan tunjangan	xxx,-	xxx,-		xxx,-
3.	Penyusutan	xxx,-		xxx,-	xxx,-
4.	Biaya perjalanan dinas	xxx,-	xxx,		xxx,-
5.	Perbaikan dan pemeliharaan	xxx,-	xxx,		xxx,-
6.	Asuransi	xxx,-	xxx,-		xxx,-
7.	Telepon dan <i>faximile</i>	xxx,-	xxx,		xxx,-
8.	Representasi	xxx,-	xxx,		xxx,-
9.	Pajak dan sanksi administratif	xxx,-	xxx,		xxx,
10.	Sumbangan	xxx,-	xxx,		xxx,
11.	Rugi penarikan harta	xxx,-	xxx,		xxx,
12.	Listrik, air dan PAM	xxx,-	xxx,		xxx,-
13.	Royalti	xxx,-	xxx,		xxx,
14.	Bunga deposito	xxx,-		xxx,-	xxx,
15.	Deviden dari sesama peseroan	xxx,-		xxx,-	xxx,
16.	Hibah dan warisan	xxx,-		xxx,-	xxx,
17.	Penyisihan piutang tak tertagih	xxx,-		xxx,	xxx,
18.	Penghapusan piutang	xxx,-			xxx,-
19.	Penyisihan harga pasar efek	xxx,-		xxx,	xxx,-
20.	Selisih kurs	xxx,-			xxx,-

Sumber: Kiswara (2009:51).

Dalam rangka pelaporan keuangan komersil, PSAK No. 46 tentang Akuntansi PPh mengakomodir konsep beda waktu (*timing/temporary differences*). Perbedaan tersebut merupakan perbedaan waktu pengakuan penghasilan atau biaya antara pajak dengan akuntansi, mengakibatkan besarnya laba akuntansi lebih tinggi daripada laba pajak atau sebaliknya. Sedangkan beda tetap (*permanent differences*) yang merupakan penghasilan dan biaya yang diakui dalam perhitungan pajak namun tidak dalam laba akuntansi/komersil dan sebaliknya. Ada empat jenis transaksi yang menimbulkan perbedaan waktu, yaitu:

1. Penghasilan termasuk dalam perhitungan pajak sesudah laba akuntansi.
2. Biaya atau beban atau rugi perhitungan pajak yang diperhitungkan sesudah laba akuntansi.
3. Pendapatan pajak yang diperhitungkan sebelum laba akuntansi.
4. Biaya atau beban atau rugi pajak yang diperhitungkan sebelum laba akuntansi.

PPh dalam laporan laba rugi disajikan sebesar beban yang diperhitungkan menurut perhitungan laba rugi akuntansi. Sebagai akibatnya, ketika beban PPh disajikan dalam laporan posisi keuangan, diperlukan akun *intermediary*, yaitu PPh Ditangguhkan, yang mengakomodir beda waktu antara akuntansi dan pembukuan pajak dalam mengakui penghasilan dan biaya. Laba yang dilaporkan dalam SPT (surat pemberitahuan pajak), yaitu laba fiskal, hampir selalu berbeda jumlahnya dengan laba yang dilaporkan pada laporan keuangan (laba komersial).

Tabel 2.3. Rekonsiliasi Akuntansi Pajak Penghasilan

No.	Akun	Saldo Komersil	Perbedaan		Saldo Fiskal
			Tetap	Waktu	
1.	Pendapatan	xxx,-	xxx,-	xxx,-	xxx,-
2.	Gaji, upah, honor dan tunjangan	xxx,-	xxx,-		xxx,-
3.	Penyusutan	xxx,-		xxx,-	xxx,-
4.	Biaya perjalanan dinas	xxx,-	xxx,		xxx,-
5.	Perbaikan dan pemeliharaan	xxx,-	xxx,		xxx,-
6.	Asuransi	xxx,-	xxx,-		xxx,-
7.	Telepon dan <i>faximile</i>	xxx,-	xxx,		xxx,-
8.	Representasi	xxx,-	xxx,		xxx,-
9.	Pajak dan sanksi administratif	xxx,-	xxx,		xxx,
10.	Sumbangan	xxx,-	xxx,		xxx,
11.	Rugi penarikan harta	xxx,-	xxx,		xxx,
12.	Listrik, air dan PAM	xxx,-			xxx,-
13.	Royalti	xxx,-	xxx,		xxx,
14.	Bunga deposito	xxx,-	xxx,-		xxx,
15.	Deviden dari sesama peseroan	xxx,-	xxx,-		xxx,
16.	Hibah dan warisan	xxx,-	xxx,-		xxx,
17.	Penyisihan piutang tak tertagih	xxx,-	xxx,-	xxx,	xxx,
18.	Penghapusan piutang	xxx,-	xxx,-	xxx,-	xxx,-
19.	Penyisihan harga pasar efek	xxx,-	xxx,-		xxx,-
20.	Selisih kurs	xxx,-		xxx,-	xxx,-

Sumber: Kiswara (2009:53).

2.3. Metode-metode Pembebanan Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan badan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak yang dalam suatu tahun memperoleh laba. Penghasilan kena pajak dihitung sebagai *output* dari rekonsiliasi fiskal antara laporan laba rugi komersil dengan ketentuan pembukuan pajak. Dengan demikian ada dua jenis penghasilan yang menghasilkan perhitungan PPh yang berbeda, yaitu laba sebelum pajak (menurut perhitungan laba rugi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan) dan penghasilan kena pajak, yang dihitung menurut ketentuan pembukuan pajak. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh definisi penghasilan, biaya, dan beban antara

akuntansi (menurut kaidah Standar Akuntansi Keuangan) dengan pajak (menurut aturan mengenai pembukuan). Selanjutnya perbedaan tersebut menghasilkan dua hal yaitu perbedaan waktu (*temporary/timing differences*) dan perbedaan tetap (*permanent differences*).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang Akuntansi PPh maupun *SFAS* No. 109 bertujuan mengakomodir perbedaan waktu pengakuan penghasilan, biaya, dan beban dalam pengungkapan laporan keuangan akuntansi (atau komersil), dengan pendekatan aset-laibilitas. Walaupun DSAK, *FASB* maupun Ditjen Pajak lebih merekomendasikan metode alokasi komprehensif PPh dengan pendekatan aset-laibilitas, namun dalam wacana akuntansi perpajakan sebenarnya terdapat metode alokasi dan non alokasi.

Menurut Kieso dan Weygant (2003:25), metode alokasi berdasarkan komponen-komponen perbedaan perhitungan dasar pengenaan pajak antara laba rugi komersil atau akuntansi dan laba rugi pajak atau fiskal, meliputi alokasi komprehensif dan alokasi parsial. Sedangkan menurut periode pembebanannya, metode alokasi dapat dibagi dua, yaitu alokasi antar periode dan intra periode. Tiga metode alokasi pajak komprehensif antar periode adalah; (1) metode tangguhan (*deferred method*), (2) metode aset-laibilitas (*assess-liabilities method*), dan (3) metode bersih dari pajak (*net-of-tax method*).

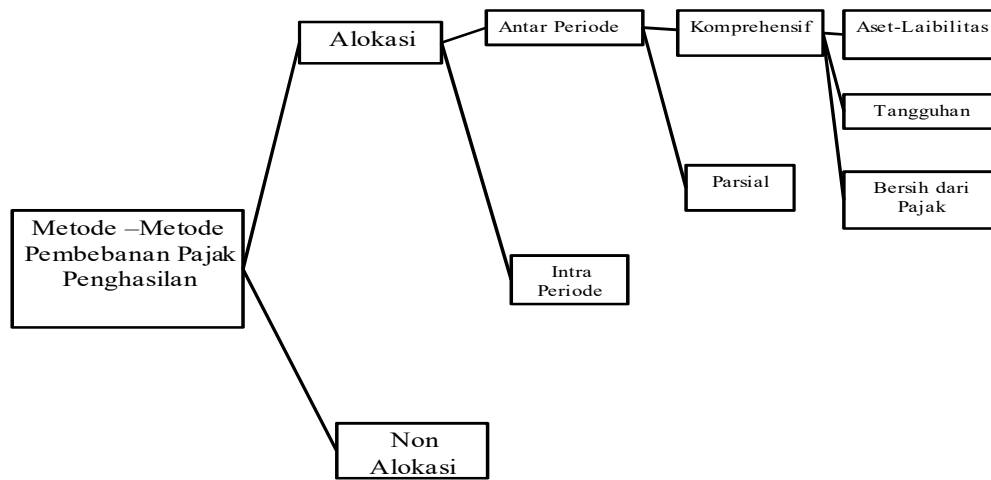
Perbedaan waktu dalam perhitungan PPh dapat terjadi sebagai akibat penggunaan depresiasi dipercepat untuk pajak dan metode garis lurus untuk akuntansi yang berdampak terhadap akumulasi laibilitas PPh ditangguhkan yang tidak akan dibayar sejauh perusahaan mengakui aset yang disusutkan (*depreciable*) lebih cepat. Walaupun PPh ditangguhkan berhubungan dengan aset

tertentu, namun saldo keseluruhan dari PPh ditangguhkan stabil atau meningkat akibat terjadinya pembelian aset tambahan.

Beban pajak merupakan residu menurut metode aset-laibilitas (yang dianut oleh PSAK No. 46, *SFAS* No. 96 dan *SFAS* No. 109 maupun *IAS* No. 12 (Revisi). Sebaliknya pajak yang ditangguhkan merupakan residu menurut metode tangguhan (yang dianut oleh *APB Opinion* No. 11). Perbedaan lain penyajian pajak tangguhan antara metode yang dianut oleh *APB Opinion* No. 11 dengan PSAK No. 46, *IAS* No. 12 (Revisi), *SFAS* No. 96 dan *SFAS* No. 109 adalah dalam alokasi pembebanan beban depresiasi sebagai komponen perbedaan waktu antara pembukuan pajak dengan akuntansi. Perkembangan tersebut memunculkan metode-metode pembebanan PPh, antara lain:

1. Metode Aset-Laibilitas (*Assets-Liabilities*)
2. Metode Tangguhan (*Deferred*)
3. Metode Bersih dari Pajak (*Net-of-Tax*)
4. Metode Alokasi Parsial (*Partial Allocation*)
5. Metode Alokasi Intra Periode (*Intra Period*)
6. Metode Non-Alokasi (*Non Allocation*)

Struktur metode pembebanan PPh dikelompokkan kedalam dua kelompok yaitu metode alokasi dan metode non alokasi. Untuk metode alokasi dibagi menjadi alokasi intra periode dan alokasi antar periode; komprehensif dan parsial. Sistematika kedudukan masing-masing metode pembebanan pajak penghasilan seperti terdapat pada gambar 2.1. di bawah ini.



Gambar 2.1.
Metode-metode Pembebanan Pajak Penghasilan

Metode-metode pembebanan PPh selanjutnya dijelaskan sebagai berikut

2.3.1. Metode Aset-Laibilitas (*Assets-Liabilities*)

Metode ini berorientasi pada laporan posisi keuangan mengingat sasaran utamanya adalah menyajikan estimasi pajak aktual yang akan dibayar pada tahun mendatang (*FASB* 1992). Akuntansi pajak tangguhan komprehensif dianut, mengartikan bahwa semua efek PPh atas penghasilan, beban, keuntungan, kerugian dan semua komponen yang mempengaruhi perbedaan antara pelaporan pajak dengan akuntansi dilaporkan dalam laporan keuangan.

Beban pajak sama dengan utang pajak ditambah dampak pajak atas semua perbedaan waktu. Dengan kata lain, jumlah beban PPh merupakan jumlah dari besarnya utang pajak berjalan (yaitu beban pajak berjalan) dan perubahan bersih dalam aset pajak ditangguhkan dan liabilitas pajak ditangguhkan (yang berupa beban atau manfaat pajak ditangguhkan).

Alokasi pajak antar periode dianut untuk memperhitungkan perbedaan waktu yang mempengaruhi perhitungan beban pajak pada tahun berjalan. Efek pajak tahun depan tercermin dalam tahun dimana terjadi. Di samping perbedaan waktu, SFAS No. 109 berkaitan dengan pengakuan utang atau pembayaran pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan dimasukkan dalam perhitungan rugi operasi yang dibawa ke depan (*forward*) untuk maksud pelaporan pajak. Aset pajak ditangguhkan berkurang melalui akun cadangan penilaian yang mencerminkan nilai manfaat pajak yang dipandang tidak akan terealisasi. Sebagai dampaknya, beban pajak secara mendasar adalah jumlah residu yang dihitung secara berjalan ditambah perbedaan antara saldo pajak ditangguhkan pada awal dan akhir tahun. Apabila tarif pajak naik menurut nilai penghasilan kena pajak, kemudian perhitungan agregatif dapat dibuat dengan menggunakan tingkat rata-rata estimasi.

Profesi akuntansi mengunggulkan pengakuan PPh ditangguhkan dengan konsep aset-liabilitas. PPh selalu dibayar penuh pada periode terjadinya. Bagaimanapun, operasi bisnis diharapkan terjadi secara berkelanjutan, sehingga beban PPh terus terjadi di masa depan. Menurut alur metode alokasi antar periode, PPh itu lebih mirip dividen daripada biaya sehingga alokasi antar periode akuntansi lebih dipandang layak mengingat pajak lebih mirip pola distribusi penghasilan sukarela, daripada dipandang sebagai komponen penentu penghasilan.

2.3.2. Metode Tangguhan (*Deferred*)

Metode ini diterapkan mengacu pada prinsip kas, yaitu jika kas diterima maka kemudian keuntungan diakui, sedangkan jika kas dibayar maka kemudian biaya

diakui (*APB* 1967). Ilustrasi dari aspek penangguhan adalah premi asuransi, dimana kas dibayar lebih dulu, biaya diakui kemudian, sehingga pengakuan ditangguhkan karena kas diterima lebih dulu, namun penghasilan diakui kemudian. Prinsip realisasi adalah proses perubahan sumber daya non kas menjadi kas. Menurut prinsip mempertemukan (*matching principle*), penghasilan dan beban yang terkait harus diakui pada saat yang sama. Sedangkan menurut prinsip alokasi, pengakuan beban itu mengacu pada penggunaan aset yang memberikan manfaat pada beberapa periode, sebagai contoh adalah depresiasi dan amortisasi. Sebagai akibat dari penggunaan metode tangguhan dalam akuntansi PPh adalah tidak adanya alokasi perbedaan waktu antara pajak dengan akuntansi ke periode berikutnya, sehingga selisih perhitungan PPh hanya disajikan sebagai pajak tangguhan dalam laporan laba rugi tahun berjalan saja.

2.3.3. Metode Bersih dari Pajak (*Net-of-Tax*)

Suatu alternatif untuk melaporkan aset dan laibilitas pajak tangguhan sebagai akun independen disebut metode pajak bersih, yang menyajikannya melekat pada komponen yang menimbulkannya. Pajak dibayar di muka dipandang sebagai akun penilaian terhadap laibilitas yang terkait dan utang pajak mendatang dipandang sebagai akun kontra aset, atau antara aset dan laibilitas dapat dikurangi secara bersamaan. Sebagai ilustrasi: jika sebuah aset modal sebesar Rp 10.000,- dihitung menurut konsekuensi pajaknya dan dibawa ke depan dalam akun yang bersangkutan, maka nilai bersih perusahaan akan menjadi Rp 6.600,- (jika tarif pajak 34%). Metode bersih dari pajak mendasarkan diri pada asumsi bahwa penyesuaian biaya historis dari aset atas efek pajak menghasilkan nilai berjalan

aset yang bersangkutan. Kesulitan penerapan metode ini adalah adanya nilai lain yang melekat pada nilai perusahaan di mata *investor*. Nilai lain tersebut meliputi tujuan sebenarnya dari akuntansi ketika mengukur dan melaporkan nilai bersih atas aset dan laibilitas, dan sulitnya mengidentifikasi perbedaan waktu yang terkait dengan perolehan aset dan laibilitas.

Menurut metode bersih dari pajak, tidak ada akun pajak tangguhan yang perlu dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Beban PPh dilaporkan dalam laporan laba rugi sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan. Dampak pajak dari perbedaan waktu yang timbul (baik yang ditentukan menurut metode pajak tangguhan maupun aset-laibilitas) tidak dilaporkan secara terpisah. Namun begitu, hal itu dilaporkan sebagai penyesuaian terhadap nilai ke depan dari aset atau laibilitas tertentu dan penghasilan atau biaya yang terkait. Sebagai ilustrasi: depresiasi itu mengurangi nilai aset karena penurunan manfaat ekonomis dan hilangnya suatu porsi pengurang pajak di masa depan, dan depresiasi dipercepat melakukan hal tersebut lebih cepat dibandingkan metode garis lurus. Dengan demikian, biaya depresiasi dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai tambahan dari jumlah yang dibiayakan oleh metode depresiasi garis lurus. Nilai tersebut setara dengan dampak pajak pada tahun berjalan yang melebihi nilai depresiasi akuntansi.

Dalam laporan posisi keuangan, dampak pajak ditangguhkan kumulatif yang terkait dilaporkan sebagai pengurang aset tertentu daripada saldo kredit dalam akun laibilitas pajak ditangguhkan. Akun aset, laibilitas, penghasilan, dan beban disajikan sebagai 'bersih dari pajak' menurut metode ini. Akun aset, laibilitas, penghasilan dan biaya disajikan sebagai nilai bersih setelah dikurangi dengan

semua laibilitas pajak yang melekat (apabila ada). Metode ini tidak direkomendasi oleh *FASB* untuk tujuan pelaporan keuangan.

2.3.4. Metode Alokasi Parsial (*Partial Allocation*)

Alokasi parsial merupakan bagian dari akuntansi akrual, menekankan pada pengeluaran kas. Pendekatan ini menganggap bahwa tidak semua akumulasi perbedaan antara perhitungan PPh menurut akuntansi dan pajak harus dibebankan ke periode berjalan. Metode alokasi parsial hanya mengakui alokasi untuk perbedaan waktu yang terjadi pada periode berjalan ke periode yang bersangkutan. Alokasi tanpa unsur dari periode sebelumnya sehingga akun PPh Ditangguhkan dalam laporan posisi keuangan hanya dibentuk untuk menampung selisih perhitungan PPh pada tahun berjalan saja.

2.3.5. Metode Alokasi Intra Periode (*Intra Period*)

Apabila konsep laba *all inclusive* diterima secara penuh, maka penyajian alokasi pajak dalam laporan laba rugi dan laporan laba yang ditahan adalah perlu. Menurut *APB Opinion* No. 9 tentang *Reporting the Results of Operations*, keuntungan dan kerugian luar biasa harus dilaporkan secara terpisah dalam laporan laba rugi. Menurut *SFAS* No. 16 penyesuaian pada periode sebelumnya perlu dilaporkan sebagai penyesuaian atas laporan laba yang ditahan. Dalam kasus ini alokasi intra periode dalam laporan laba rugi atau antara laporan laba rugi dan laporan laba yang ditahan membuat pelaporan laba bersih operasi sebelum pos-pos luar biasa menjadi lebih bermanfaat. Menurut metode ini nilai PPh (maupun manfaatnya) dapat dialokasikan ke operasi berkelanjutan, pemberhentian operasi

(*discontinued operation*), pos luar biasa, efek kumulatif perubahan akuntansi, dan penyesuaian terhadap periode sebelumnya. Jika hanya terdapat satu pos di luar operasi berkelanjutan, maka porsi sisa setelah alokasi kemudian dialokasikan ke pos tersebut. Laba bersih operasi sebelum komponen luar biasa tidak akan bercampur dengan pencatatan keuntungan (bersih dari pajak) yang dilaporkan secara terpisah.

Alokasi pajak intra periode mengaitkan dua atau lebih pos selain operasi berkelanjutan, sehingga bersifat lebih kompleks. Dampak pajak atas komponen yang berbeda dari penghasilan pada suatu tahun dilaporkan dengan cara dimana dampak PPh ditangguhkan mengikuti elemen penghasilan. Metode non alokasi, alokasi parsial, dan alokasi komprehensif berbeda dalam hal pengakuan akuntansi terhadap PPh ditangguhkan sebagai akibat dari perbedaan waktu.

2.3.6. Metode Non-Alokasi (*Non Allocation*)

Keinginan untuk menerapkan alokasi pajak antar periode tidak banyak yang menyetujui sehingga yang lebih dipercaya adalah pajak sesungguhnya yang disajikan dalam laporan laba rugi adalah yang benar-benar dibayar kepada negara (Kieso dan Weygant, 2003:30). Alur pendekatan non alokasi tidak mempercayai bahwa pengakuan PPh ditangguhkan itu dapat memberikan informasi berguna atau setidaknya mampu menghemat biaya. Sifat laibilitas ditangguhkan sebagai penampung perbedaan waktu tidak jelas sebab bukan merupakan utang sesungguhnya yang harus dibayar.

Pembayaran pajak tambahan di masa depan adalah bersyarat, yaitu tergantung pada nilai laba kena pajak di masa depan. Jika penghasilan kena pajak tidak terjadi

di masa depan maka tidak akan timbul laibilitas, dan aset pajak ditangguhkan pun juga tidak akan diakui.

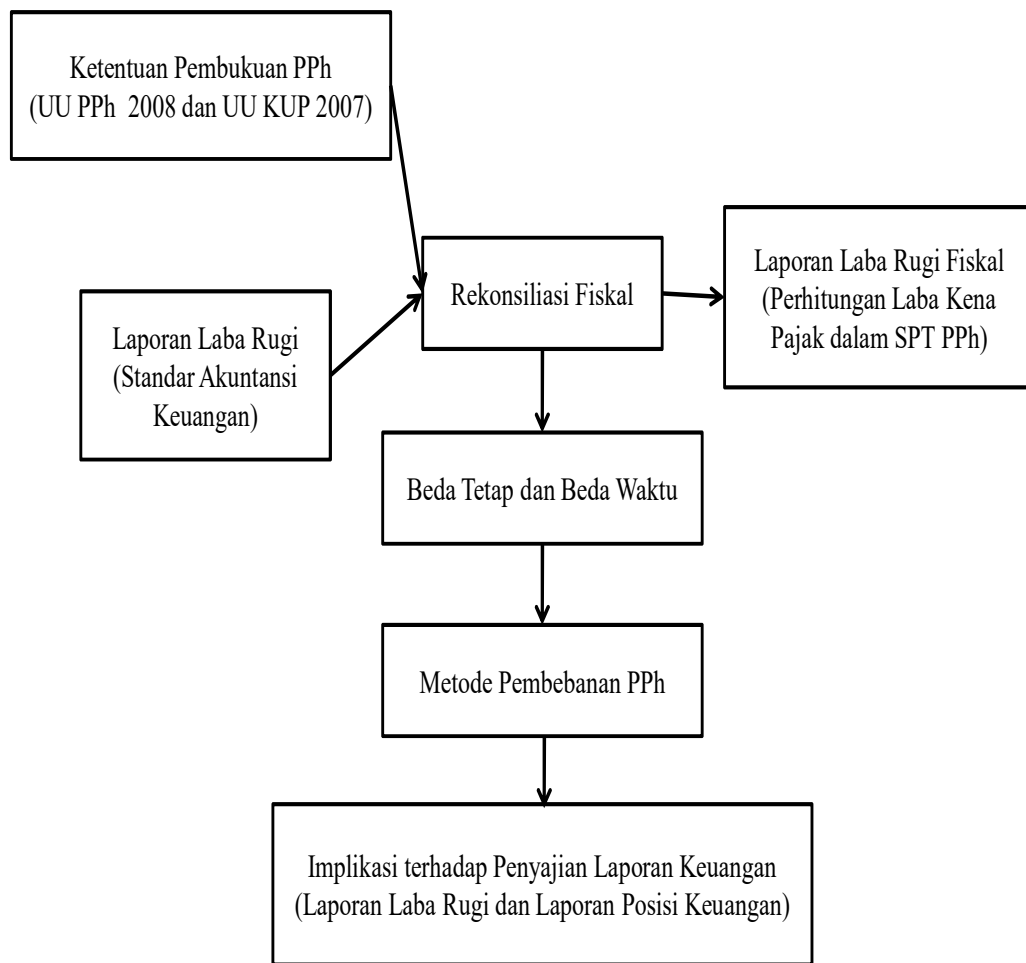
Baik metode tangguhan maupun bersih dari pajak melaporkan nilai laba bersih yang sama. Perbedaannya berhubungan dengan klasifikasi biaya, nilai bersih aset pajak dan keberadaan akun PPh ditangguhkan. Metode aset-laibilitas menggunakan tarif pajak lebih tinggi dibandingkan kedua metode terdahulu sehingga saldo laba bersih lebih rendah, karena menggunakan tarif pajak periode mendatang dimana perbedaan waktu akan dialokasikan.

Walaupun pandangan menyatakan bahwa alokasi pajak komprehensif paling layak, namun ada saja yang memakai alokasi parsial atau tanpa alokasi atau bersih dari pajak. Bagi perusahaan yang tidak *go-public*, metode tanpa alokasi atau metode bersih dari pajak dipilih sebagai sarana paling mudah untuk membebaskan PPh Badan dalam laporan laba rugi komersil.

Penerbitan akuntansi PPh menurut *SFAS* No. 96 dan *SFAS* No. 109 menimbulkan kritik menyangkut aset dan laibilitas pajak ditangguhkan, yaitu:

1. Ketidak-konsistenan penyajian aset dan laibilitas pajak ditangguhkan (Wolk dkk. 1989:39 ; Parks 1988:43)
2. Kegagalan *FASB* mengizinkan pendiskontoan laibilitas pajak ditangguhkan (Rayburn 1987:43).

Apabila dihubungkan dengan metode-metode pembebanan PPh, maka konsep pembukuan menurut ketentuan pajak dan penyajian laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) akan sebagaimana dalam gambar 2.2. berikut ini:



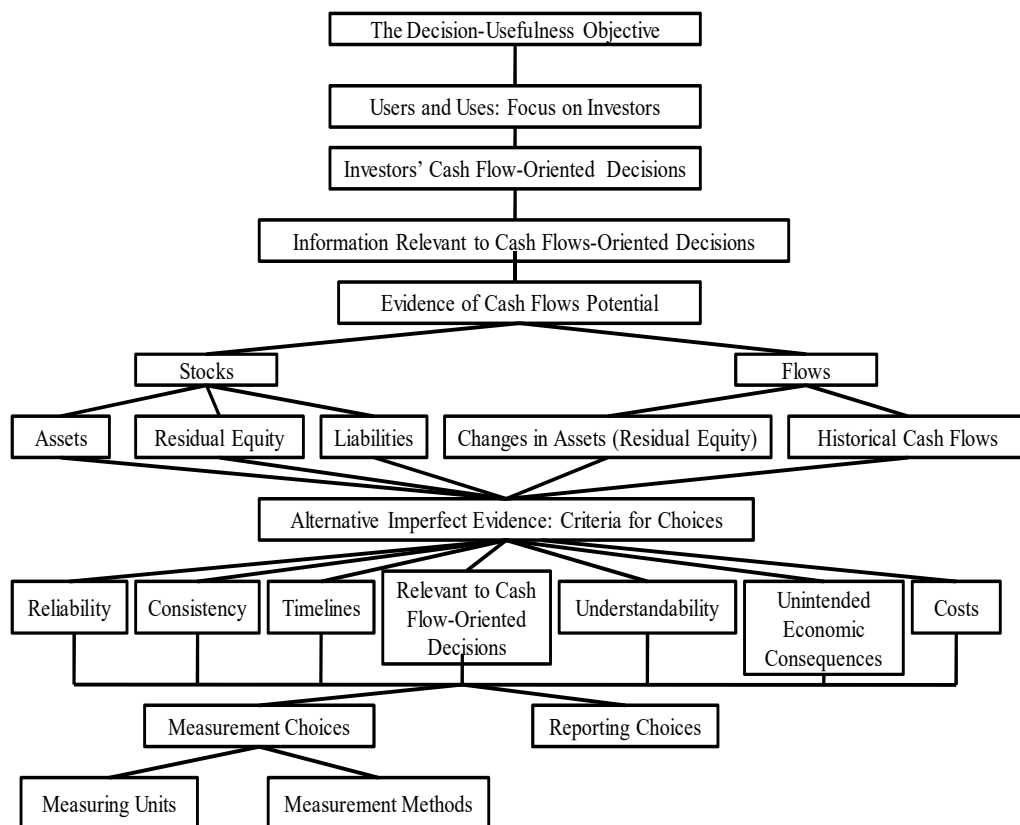
Gambar 2.2.
Model Pembebanan PPh dan Penyajian Laporan Keuangan

2.4 Kegunaan-Keputusan Informasi Akuntansi

Teori kegunaan-keputusan (*decision-usefulness theory*) dari informasi akuntansi dikemukakan dalam disertasi George J. Staubus untuk pertama kalinya pada tahun 1954. Teori kegunaan-keputusan mencakup mengenai syarat dari kualitas informasi akuntansi yang berguna dalam keputusan yang akan diambil oleh pengguna. Fitur kegunaan-keputusan nampak dalam ringkasan diagramis mengacu pada kriteria pilihan akuntansi dan pendekatan pembuktian dalam

pengukuran aset dan laibilitas (Gambar 2.3.). Premis dari teori kegunaan-keputusan adalah

1. Tujuan akuntansi adalah menyediakan informasi finansial mengenai perusahaan guna pengambilan keputusan.
2. Tujuan akuntansi dikaitkan dengan investor adalah menyediakan informasi finansial mengenai suatu perusahaan yang akan digunakan dalam pembuatan keputusan investasi
3. Investor mencakup pengertian pemilik dan kreditur.



Gambar 2.3.
Fitur Teori Kegunaan-Keputusan Akuntansi Bagi Investor
Sumber: Staubus (2000:43)

Relevan yang dimaksud dalam fitur di atas mengacu pada prediksi tingkat kembalian di masa depan bagi investor. Suatu properti finansial adalah relevan bagi suatu keputusan bila memberikan materialitas yang cukup. Hal itu berarti memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan. Reliabilitas mengandung beberapa kriteria dalam pemilihan metode pengukuran alternatif yang mungkin dan secara jelas diakui. Reliabilitas tidak dapat didefinisikan secara lengkap oleh Staubus hingga tahun 1970. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya ketentuan mengenai cara pengukuran dan mengingat adanya perbedaan pendapat dengan pihak-pihak lain. Aspek reliabilitas memiliki kedekatan makna dengan relevan.

Teori kegunaan-keputusan informasi akuntansi merupakan bagian dari teori normatif (Staubus 2000:265). Teori normatif adalah teori yang didasarkan pada keyakinan yang seharusnya terjadi dalam kondisi tertentu, tidak hanya berdasarkan pada observasi. Contoh teori normatif lainnya adalah *Continuously Contemporary Accounting (CoCoA)* yang dinyatakan oleh (Chambers 1970:39). Teori normatif tidak mengevaluasi mengenai praktik akuntansi yang sebenarnya tetapi lebih menggambarkan bagaimanakah praktik tertentu itu seharusnya dilakukan. Walaupun kadang-kadang preskripsi tersebut menyimpang dari praktik yang sebenarnya dan berdasarkan opini pribadi tentang apa yang seharusnya terjadi.

Informasi ekonomi itu dapat terkait dengan biaya yang diperlukan untuk memproduksi informasi akuntansi, yang dapat bersifat analitis atau deduktif berdasarkan pengalaman sebelumnya. Kegunaan dari informasi akuntansi bagi investor dan kreditur terkait dengan model penilaian perusahaan, hipotesis pasar yang efisien, *CAPM (Capital Assets Pricing Models)*, studi penilaian silang (*cross-*

sectional), peranan *auditor* perusahaan, data akuntansi dan kreditur serta alokasi akuntansi.

Informasi ekonomi yang terkait dengan teori keputusan ternyata tidak mampu menyajikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan normatif. Informasi tersebut hanya dapat menentukan nilai tertentu yang secara sempit dapat mendefinisikan keputusan yang dimaksud olehnya. Keterbatasan kemampuan informasi ekonomi dapat terjadi atas semua jenis informasi yang dibutuhkan. Hal ini dikarenakan pengambil keputusan dalam dunia nyata menghadapi keputusan yang lebih kompleks. Diversifikasi pengguna mungkin merupakan perilaku yang bervariasi dan tidak dapat menjelaskan secara sempurna atau memprediksi perilaku manusia atau mengakses jenis informasi yang sebenarnya dibutuhkan oleh pengguna (Kam 1996:139).

Permasalahan subjektif mendasar teori normatif adalah informasi yang merupakan suatu komoditas ekonomi dan perolehan sejumlah informasi menjadi masalah pilihan ekonomi. Informasi akuntansi dievaluasi dalam kaitan kemampuannya dalam meningkatkan kualitas dari pilihan optimal dalam suatu permasalahan mendasar yang seharusnya dipecahkan oleh setiap individu. Dalam konteks metode-metode pembebanan PPh, penyajian laporan keuangan sebagai akibatnya memiliki dampak terhadap daya guna pengambilan keputusan ekonomi.

Sistem informasi dengan utilitas yang diharapkan tertinggi lebih disukai oleh beberapa pihak. Klasifikasi dalam teori normatif mencakup teori kegunaan-keputusan yang menggambarkan jenis dan pengguna informasi, mengacu pada kebutuhan pengambilan keputusan. Penekanan pada aspek pengambil keputusan dilakukan melalui evaluasi terhadap hasil riset yang mengacu pada kriteria

informasi yang diinginkan. Pengetahuan tersebut kemudian digunakan untuk menggambarkan informasi yang seharusnya dipasok oleh perusahaan. Penekanan model keputusan tertentu dilakukan setelah menganalisis model-model yang berbasis pada persepsi peneliti yang bersangkutan mengenai pembuatan keputusan yang efisien. Pendekatan model keputusan ditujukan untuk mengetahui informasi apa yang diperlukan untuk membuat keputusan, tanpa mempertanyakan informasi apa yang diinginkan oleh pengguna, dan dapat memiliki orientasi normatif dan deduktif (Staubus, 2000:40). Metode-metode pembebanan PPh memiliki kedekatan tinggi dalam penyajian laporan keuangan. Hal tersebut disebabkan oleh sifat pembayaran PPh yang tahunan sehingga perlu dilakukan analisis terhadap metode yang paling efisien dan efektif bagi pengambilan keputusan pemakai.

2.5. Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Sebagaimana dinyatakan oleh Shackelford dan Shevlin (2001:31), penelitian-penelitian mengenai perpajakan dalam konteks akuntansi telah banyak dilakukan. Berikut ini disajikan tabel data penelitian sebelumnya yang kontekstual dengan penelitian ini, yaitu mengenai kritik terhadap metode akuntansi PPh, data penelitian, dan pengukuran variabel, dimensi maupun indikator.

Mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu dengan konteks akuntansi perpajakan dalam tabel 2.4. belum banyak penelitian yang menggali kompetensi metode-metode pembebanan pajak selain pendekatan aset-laibilitas dan aspek kegunaan-keputusan informasi akuntansi atas metode-metode tersebut. Penelitian ini menyajikan kompilasi atas riset terdahulu, acuan teori dan lebih jauh melakukan pengujian empirik terhadap aplikasi berbagai model pengukuran guna

dikaitkan dengan aspek reliabilitas dan nilai relevan kegunaan-keputusan informasi akuntansi.

Penggunaan data primer berupa penyajian kembali laporan keuangan menurut 5 (lima) metode-metode pembebanan PPh selain pendekatan aset-laibilitas, yaitu bersih dari pajak (*net of tax*), tangguhan (*deferred*), alokasi parsial (*partial allocation*), alokasi intra periode, dan non alokasi merupakan salah satu metode baru dalam penggunaan data empiris penelitian tentang akuntansi perpajakan.

Tabel 2.4. Penelitian-penelitian Sebelumnya

No.	Peneliti dan Tahun	Judul dan Variabel	Data	Hasil
1.	Ayers (1998) The Accounting Review Vol.73, No. 2 April 1998. Pp195-212. University of Georgia.	<i>Deferred Tax Accounting Under SFAS No. 109 : An Empirical Investigation of Its Incremental Value Relevance Relatife to APB No. 11</i> Nilai relevan pengungkapan informasi menurut <i>SFAS</i> No. 109 dan <i>APB Opinion</i> No. 11 (Y), laibilitas pajak ditangguhkan bersih menurut <i>SFAS</i> No. 109 (X).	Perusahaan yang berada pada data 3.400 yang terdaftar dalam <i>Compustat</i> tahun 1993.	Data <i>SFAS</i> No. 109 bernilai relevan lebih baik daripada <i>APB Opinion</i> No. 11. Bukti menyatakan bahwa perubahan yang dibuat oleh <i>SFAS</i> No. 109, yang berupa pemisahan pengakuan aset pajak ditangguhkan, pembentukan cadangan penilaian aset pajak ditangguhkan dan penyesuaian akun pajak ditangguhkan atas perubahan tarif pajak, masing-masing memberikan nilai relevan mengenai data perusahaan. Hasil ini menyimpulkan bahwa <i>SFAS</i> No. 109 menambah nilai relevan dari jumlah pajak ditangguhkan dalam laporan keuangan.
2.	Chaney dan Jeter (1994) Journal of Accounting, Auditing and Finance, Vol.9. Winter.	<i>The Effect of Deferred Taxes on Security Prices.</i> Kembalian sekuritas (Y), komponen pajak tangguhan tidak lancar yang terkandung dalam komponen laba dan pos-pos yang terkait (X).	Perusahaan dipilih setiap tahunnya menurut data kembalikan bulanan dan data <i>Compustat</i> yang tersedia bagi setiap variabel riset. Jumlah perusahaan dalam sampel berkisar dari 191 hingga 193 dalam	Reaksi pasar terhadap pos-pos pajak ditangguhkan yang tidak terjadi berasal dari prediktabilitas terhadap pos-pos yang terjadi. Komponen laba, yang dihitung dengan aturan <i>APB Opinion</i> No 11, memiliki nilai relevan berkaitan dengan harga sekuritas dalam beberapa hal dari

			<p>tahun 1977.</p> <p>Bank dan jasa layanan umum (<i>utilities</i>) dipandang sebagai industri yang diregulasi, sehingga dikeluarkan dari sampel.</p>	<p>perusahaan yang berguna untuk <i>purging noise</i> dari pelaporan laba.</p>
3.	<p>Chavis (1992)</p> <p>Oil and Gas Tax Quarterly , Vol 41, No. 1, pp.133-143. jaf.sagepub.com</p>	<p><i>Voluntary disclosure of private, non- proprietary information by selected oil and gas firms: an empirical test of analytical principal/agent models.</i></p> <p>Aspek pengungkapan ekonomis PPh ditanggguhkan (Y), nilai pasar perusahaan (X).</p>	<p>Laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang <i>go-public</i> di NYSE.</p>	<p>Kewajiban pengungkapan akuntansi PPh memiliki signifikansi ekonomis terhadap nilai pasar perusahaan dan keuntungan.</p>
4.	<p>Behn dkk. (1998)</p> <p>Accounting Horizons Vol 12 No. 1 March. pp 63-78. faculty.etsu.edu</p>	<p><i>The Determinant of the Defferred Tax Allowance Account Under SFAS 109</i></p> <p>Pengakuan cadangan penilaian aset pajak ditanggguhkan (Y), sumber- sumber SFAS No. 109 (X).</p>	<p>Sejumlah 191 perusahaan yang terdaftar di pasar modal NYSE atau AMEX, memiliki kode industri antara 2000-4000, memiliki opini <i>audit</i> wajar tanpa syarat, dan melaporkan cadangan penilaian aset pajak ditanggguhkan.</p>	<p>Variabel-variabel tertentu digunakan dalam merancang estimasi akun cadangan penilaian. Proksi atau metode yang lebih baik guna mengevaluasi akun cadangan penilaian aset pajak ditanggguhkan.</p>
5.	<p>Landry (1998)</p>	<p><i>Evidence on the value-relevance of deferred tax assets and</i></p>	<p>Perusahaan yang terdaftar di NYSE dan AMEX selama tahun 1992 hingga</p>	<p>Nilai relevan klasifikasi laporan posisi keuangan atas pajak</p>

	PhD Thesis. University of Florida.	<i>deferred tax liabilities.</i> Rasio harga dengan nominal terhadap laba (X) dan pajak ditangguhkan (Y).	tahun 1996.	ditangguhkan dan keharusan pengungkapannya dalam catatan atas laporan keuangan menurut <i>SFAS</i> No. 109. Jumlah aset atau laibilitas dapat mempengaruhi interpretasi dan analisis atas laporan keuangan. <i>Investor</i> dan kreditur dapat membatalkan pajak ditangguhkan tercakup dalam ekuitas atau menjadikannya sebagai aset atau laibilitas riil. Rasio seperti utang ekuitas, kembalian aset dan rasio lancar pun terpengaruh.
6.	Brioschi dkk. (2000) Managerial and Decision Economics Article. Volume 21, Issue 8, pages 329–338, December 2000. MDE.	<i>Estimating Deferred Taxation on Dividends in Business Groups.</i> Pajak tangguhan atas deviden (Y), komponen perhitungan pajak dalam perusahaan berbentuk grup (X).	Laporan keuangan perusahaan yang berbentuk grup, yang <i>go public</i> di <i>NYSE</i> .	Menjelaskan dampak komponen-komponen perhitungan pajak ditangguhkan terhadap besarnya pajak ditangguhkan dalam perusahaan yang berbentuk grup.
7.	Lu (2000) PhD Thesis. University of Southern California.	<i>The valuation allowance for deferred tax assets and earnings management.</i> Kesempatan untuk melakukan	<i>File</i> tahunan <i>Compustat Industrial and Full Coverage</i> (1998). Karena <i>SFAS</i> No. 109 efektif berlaku setelah tanggal 15 Desember 1992 dan sebagian besar mengadopsinya tahun	Para manajer dalam perusahaan sampel menggunakan cadangan penilaian aset pajak tangguhan guna mengaksentuasi penurunan berjalan laba bersih murni. Hal itu demi

		manajemen laba (Y), penentuan cadangan penilaian aset pajak ditangguhkan (X)	1993 maka tahun pertama sampel adalah 1994 dan tahun akhir adalah 1996. Diperoleh 203 observasi tahun perusahaan.	mempermudah peningkatan pelaporan laba di tahun mendatang. Para manajer di perusahaan yang memiliki resiko <i>leverage</i> lebih besar menyesuaikan cadangan penilaian untuk meningkatkan laba yang dilaporkan. Hal itu mungkin guna mengurangi probabilitas terjadinya pelanggaran kontrak utang yang restriktif. Para manajer menggunakan akun cadangan penilaian untuk meringankan beda antara laba aktual perusahaan per lembar dan <i>forecast</i> analis. Hasil penelitian ini konsisten dengan perhatian bahwa para manajer menggunakan cadangan penilaian sebagai pertanda dari gambaran ekspektasinya terhadap profitabilitas perusahaan di masa depan.
8.	Allen dan Surdick (2001) The CPA Journal-Issue August 2001-2001.	<i>Graphical Transaction Model for Deferred Tax Analysis and Accounting.</i> Model grafis transaksi (Y),	Pernyataan standar pajak ditangguhkan (<i>APB Opinion</i> No. 11, <i>SFAS</i> No. 96 dan <i>SFAS</i> No. 109) dan laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang menerapkan	Cara termudah untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi yang memiliki konsekuensi pajak, keterhubungan dan cara melaporkannya.

	nysscpa.org.	analisis dan akuntansi terhadap pajak tangguhan (X).	pernyataan tersebut.	
9.	Brickner (2003) Journal of Business and Economics Research, April, 2003: 17-32. Eastern Michigan University.	<i>An Analysis of Factors Impacting the Value-Relevance of SFAS No. 107 Fair Value Disclosures.</i> Nilai relevan pengungkapan wajar SFAS No. 107 (Y), faktor-faktor yang melekat dalam karakteristik perusahaan (X).	Laporan keuangan perusahaan yang <i>go-public</i> di NYSE.	Tata cara pengukuran nilai relevan atas penerapan suatu standar akuntansi keuangan terhadap faktor-faktor yang melingkupi karakteristik perusahaan.
10.	Chrispin (2002) <i>Accountancy</i> 129.1305 (2002). Proquest ABI/INFORM	<i>Financial Reporting: Deferred Tax-Full Of Surprises.</i> Pajak ditangguhkan (Y), komponen-komponen pelaporan keuangan (X).	Laporan keuangan perusahaan yang <i>go-public</i> di NYSE.	Dampak dari pengungkapan pajak ditangguhkan dalam pelaporan keuangan.
11.	Cristi dan Mills (2002) The Accounting Review, vol 77, 2002. The University of IOWA.	<i>Materiality and Contingent Tax Liability Reporting.</i> Laibilitas pajak ditangguhkan (Y), faktor-faktor yang menjelaskan keputusan perusahaan (X).	Data <i>audit IRS</i> yang bersifat rahasia dan catatan kaki laporan keuangan dari 100 perusahaan besar dari tahun 1987 hingga 1995.	Perusahaan tidak sering mengungkapkan keberadaan klaim <i>IRS</i> . Sebagian besar pengungkapan tidak mengandung informasi rinci menurut SFAS No. 5. Probabilitas pengungkapan meningkat seiring klaim.
12.	Givoly dan Hayn (2002)	<i>Rising Conservatism: Implications for Financial</i>	Laporan keuangan perusahaan yang <i>go-public</i> di NYSE.	Dampak dari keterbatasan konservatisme yang diikuti dalam

	Financial Analysts Journal Vol. 58, No. 1 (Jan. - Feb., 2002), pp. 56-74. CFA Institute.	<i>Analysis.</i> Komponen-komponen analisis keuangan (Y), keterbatasan konservatisme (X).		rangka penyajian laporan keuangan terhadap efektifitas hasil dari analisis finansial.
13.	Hall (2002) Public Services International Research Unit (PSIRU).	<i>Financial and Other Problems.</i> Kegunaan laporan keuangan (Y), pernyataan akuntansi (X).	Laporan keuangan perusahaan yang <i>go-public</i> di NYSE.	Dampak dari pernyataan akuntansi dalam pelaporan keuangan terhadap kegunaan laporan keuangan.
14.	Rego (2003) The Accounting Review 78.2 (2003): 491-521. aaajournals.org	<i>Earnings management: New evidence based on deferred tax expense.</i> Aktifitas penghindaran pajak (Y), komponen-komponen laporan keuangan yang menjadi sarana penghindaran pajak (X).	Perusahaan multinasional yang <i>go- public</i> di NYSE.	Komponen-komponen laporan keuangan yang biasa digunakan oleh perusahaan multinasional untuk menghindari pajak.
15.	Schrand dan Wong (2003) Contemporary Accounting Research Volume 20, Issue 3. Canadian Academic Accounting Association.	<i>Earnings management using the valuation allowance for deferred tax assets under SFAS No. 109.</i> Aset pajak ditangguhkan (Y), manajemen laba lewat pengungkapan cadangan penilaian.	Perusahaan yang <i>go-public</i> di NYSE dan menerapkan SFAS No. 109.	Ketentuan mengenai pencadangan dalam SFAS No. 109 ternyata digunakan oleh perusahaan untuk memanipulasi laba.

16.	Sidhu dan Whittred (2003) Australian Journal of Management Vol.28.1. aum.sagepub.com	<i>The role of political costs in the deferred tax policy choice.</i> Penerapan pajak ditangguhkan (Y), biaya-biaya politis yang tercakup dalam laporan keuangan (X).	Perusahaan yang <i>go-public</i> di NYSE.	Peranan biaya-biaya politis yang dikeluarkan perusahaan, yang mendorong penerapan pajak ditangguhkan.
17.	Holland dan Jackson (2004) Accounting and Business Research Vol.34.2. Routledge.	<i>Earnings Management and Deferred Tax.</i> Manajemen laba (Y), komponen-komponen pajak ditangguhkan (X).	Laporan keuangan perusahaan yang <i>go-public</i> di NYSE.	Peranan komponen pajak ditangguhkan dalam upaya perusahaan mengelola laba.
18.	Christensen dan Murphy (2004) Journal Palgrave Macmillan Development Vol.47.3 (2004): 37-44. Palgrave Macmillan Development.	<i>The social irresponsibility of corporate tax avoidance: Taking CSR to the bottom line</i> Tanggung jawab sosial (Y), penghindaran pajak perusahaan (X).	Perusahaan yang <i>go-public</i> di NYSE.	Wujud kepedulian sosial perusahaan yang melakukan upaya penghindaran pajak.
19.	Dunbar dkk. (2004) Issues in Accounting Education 19.3. American	<i>Genesis of an online course.</i> Aktifitas manajemen laba (Y), aturan bonus depresiasi yang	Perusahaan <i>go-public</i> di NYSE dan menerapkan akuntansi PPh menurut SFAS No. 109.	Dampak dari adanya perbedaan dalam perhitungan depresiasi antar pajak dan akuntansi yang berbasis akrual, terhadap upaya pengelolaan

	Accounting Association.	ditangguhkan dalam ukuran akrual (X).		laba.
20.	Colley dkk. (2005) Historical Research Vol. 78.202 (2005): 540-562. John Wiley & Sons, Inc.	<i>The Shoreditch tax frauds: a study of the relationship between the state and civil society in 1860.</i> Teori akuntansi pajak ditangguhkan (Y), prosedur yang diminta FASB dalam konteks unit permasalahan (X).	Rasio keuangan perusahaan dalam industri yang berbeda dalam penelitian Chaney dan Jeter (1988) dan Magee (1984).	Pelaporan pajak ditangguhkan itu terlalu kompleks dan mahal untuk diterapkan. Pajak ditangguhkan tidak cocok dengan definisi FASB mengenai laibilitas dan tidak berhak tercantum sebagai akun laporan posisi keuangan.
21.	Kamran dan Goodwin (2007) Accounting & Finance Vol. 47.1 (2007): 1-22. John Wiley & Sons, Inc.	<i>An empirical investigation of earnings restatements by Australian firms.</i> Nilai relevan dari penyajian kembali laporan keuangan (Y), tiga alasan penyajian kembali laporan keuangan, yaitu perubahan kebijakan akuntansi, revisi atas estimasi, dan tidak diketahui (X).	Penyajian kembali laporan keuangan dari 500 perusahaan top di Australia tahun 2006.	Penyajian kembali laporan keuangan berasosiasi negatif dengan nilai pasar dan non pasar.
22.	Foo (2008) PhD thesis thesis. Victoria University	<i>A cross-cultural study of accounting concepts applied in international financial reporting</i>	Survey surat terhadap 244 akuntan di Malaysia untuk menggali sikap, keyakinan dan pendapat mereka mengenai sasaran motivasional, dan	Suatu kumpulan dari level individu, nilai motivasional akuntansi merupakan representasi valid komprehensif dan teoritis dari sub

		<p><i>standards.</i></p> <p>Budaya (X) Struktur universal dari level individu atas nilai motivasional manusia sebagai domain dari akuntansi (Y).</p>	<p>interpretasi serta kebijakan mereka terhadap pelaporan keuangan.</p>	<p>budaya akuntansi yang dibandingkan dengan kerangka <i>Hofstede-Gray</i>. Hubungan signifikan ditemukan di seputar nilai motivasional akuntan dalam menginterpretasi dan membuat kebijakan pelaporan keuangan.</p>
23.	<p>Lynn dkk. (2008)</p> <p>Journal of the American Taxation Association Vol.30.2. aaajournals.org</p>	<p><i>Incremental value relevance of unrecognized deferred taxes: evidence from the United Kingdom.</i></p> <p>Dekomposisi nilai buku harga saham per lembar (X), nilai dari aset pajak ditangguhkan bersih baik yang diakui maupun tidak diakui (Y).</p>	<p>Suatu sampel <i>pool</i> dari perusahaan di Inggris selama tahun 1993 hingga tahun 1998.</p>	<p>Semua bagian dari pajak ditangguhkan (yaitu aset atau laibilitas) memiliki nilai yang sama menurut hasil regresi.</p>



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka akan digunakan metode penelitian kualitatif atau lebih tepatnya semi kualitatif, dengan penekanan pada studi eksplorasi (*exploratory study*). Pada studi eksplorasi ini akan digunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan diperkaya dengan evaluasi terhadap kondisi yang ada saat ini serta klarifikasi masalah penelitian yang mungkin ada selama penelitian berlangsung.

Cooper (2006:11) mengemukakan bahwa *“The purpose of qualitative research is based on researcher immersion in the phenomenon to be studied, gathering data which provide a detailed description of events, situation and interaction between people and things, (thus) providing depth and detail”*. Lebih lanjut dikemukakan *“The objectives of exploration may accomplished with different techniques. Both qualitative and quantitative techniques are applicable, although exploration relies more heavily on qualitative techniques”*.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan dikoleksi adalah data primer. Data primer diolah dari pendapat para ahli (*experts*) yaitu mereka yang mengetahui dan memahami dengan baik mengenai akuntansi dan perpajakan. oleh karena itu respondennya dapat berasal dari mereka akademisi, pelaku atau praktisi perpajakan dan akuntansi atau

para pengamat bahkan mungkin juga para pejabat formal dan informal dibidang perpajakan dan akuntansi.

Data sekunder diperoleh dari lembaga terkait seperti Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta literatur kepustakaan. Data sekunder berupa peraturan dan keputusan resmi terkait akuntansi dan perpajakan yang dikembangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Undang-undang Perpajakan dengan mengembangkan ilustrasi perbedaan enam metode alokasi pembebanan PPh dalam penyajian laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan.

3.3. Prinsip Kerja

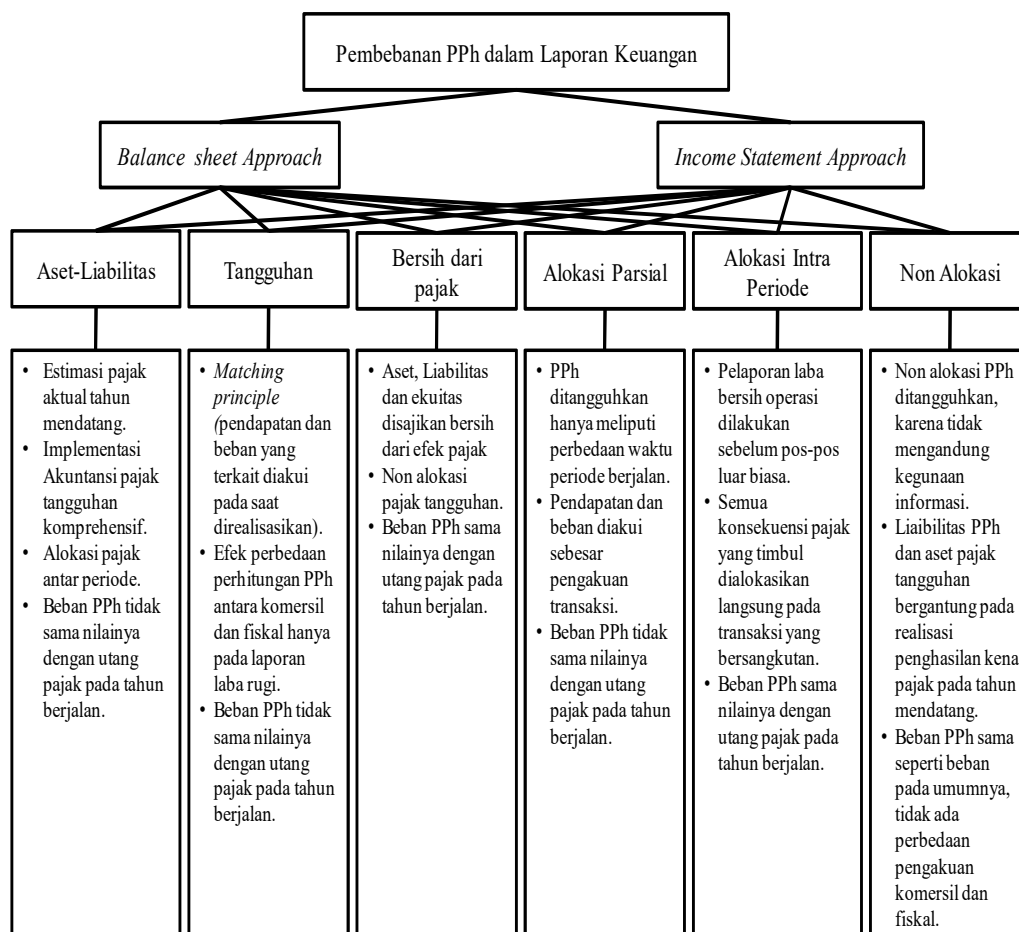
Ide dasar dari prinsip kerjanya adalah:

1. Penyusunan Hirarki
2. Penilaian Kriteria
3. Penentuan Kriteria dan Alternatif
4. Konsistensi Logis

Proses penyusunan elemen-elemen secara hirarkis meliputi pengelompokan elemen-elemen dalam komponen yang sifatnya homogen dan menyusun komponen-komponen tersebut dalam level hirarki yang tepat. Hirarki juga merupakan abstraksi struktur suatu sistem yang mempelajari fungsi interaksi antara komponen dan juga dampak-dampaknya pada sistem. Abstraksi ini mempunyai bentuk saling berkaitan, tersusun dan suatu puncak atau sasaran utama (*ultimate goal*) turun ke sub-sub tujuan tersebut, lain pelaku (aktor) yang memberi dorongan, turun tujuan-tujuan pelaku, kemudian kebijakan-kebijakan,

strategi-strategi tersebut. Dengan demikian hirarki adalah sistem yang tingkatan-tingkatan (level) keputusannya berstratifikasi dengan beberapa elemen keputusan pada setiap tingkatan keputusan.

Abstraksi kerangka berpikir untuk menyusun hirarki keputusan, yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1.
Alur Pikir Model Pembebanan Pajak Penghasilan

Abstraksi susunan hirarki keputusan dapat dilihat di bawah ini:

1. Level 1 : Fokus/Sasaran utama
2. Level 2 : Faktor/Kriteria
3. Level 3 : Obyektif

4. Level 4 : Alternatif

Seperti pada Gambar 3.1. variabel yang diamati pada penelitian ini terbagi sesuai dengan hirarkinya, yaitu:

1. Hirarki I adalah Fokus/Sasaran Utama, yaitu model pembebanan PPh.
2. Hirarki II adalah Kriteria, terdiri atas; (1) *Balance Sheet Approach* dan (2) *Income Statement Approach*.
3. Hirarki III adalah Alternatif Model/Metode pembebanan PPh, terdiri atas (1) Aset-Liabilitas, (2) Tanggahan, (3) Bersih dari Pajak, (4) Alokasi Parsial, (5) Alokasi Intra Periode, dan (6) Non Alokasi. Setiap metode tersebut terdiri dari berbagai unsur-unsur.

Tiap tingkatan dan hirarki keputusan mempengaruhi faktor puncak atau tujuan utama dengan intensitas yang berbeda. Melalui penerapan teori matematika pada hirarki dapat dikembangkan suatu metode yang mengevaluasikan dampak dari suatu tingkat keputusan terdekat di atasnya, yaitu berdasarkan komposisi kontribusi relatif (prioritas) dan tiap elemen pada tingkat keputusan terhadap setiap elemen dan tingkat keputusan terdekat.

3.4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang dikembangkan awal tahun 1970-an oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika dari Universitas Pittsburg. AHP pada dasarnya didesain untuk menangkap secara rasional persepsi orang yang berhubungan sangat erat dengan permasalahan tertentu melalui prosedur yang didesain untuk sampai pada suatu skala preferensi di antara berbagai set alternatif.

Analisis ini ditujukan untuk membuat suatu model permasalahan yang tidak mempunyai struktur, biasanya ditetapkan untuk memecahkan masalah yang terukur (kuantitatif), masalah yang memerlukan pendapat (*judgement*) maupun pada situasi yang kompleks atau tidak terkerangka, pada situasi dimana data statistik sangat minim atau tidak ada sama sekali dan hanya bersifat kualitatif yang didasari oleh persepsi, pengalaman ataupun intuisi.

AHP ini juga banyak digunakan pada keputusan untuk banyak kriteria, perencanaan, alokasi sumberdaya dan penentuan prioritas dari strategi-strategi yang dimiliki pemain dalam situasi konflik (Saaty, 1993:3). Jadi, AHP merupakan analisis yang digunakan dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan sistem, dimana pengambil keputusan berusaha memahami suatu kondisi sistem dan membantu melakukan prediksi dalam mengambil keputusan.

Model AHP memakai persepsi manusia yang dianggap 'ekspert' sebagai input utamanya, yaitu pada orang yang mengerti benar permasalahan yang dilakukan, merasakan akibat suatu masalah atau punya kepentingan terhadap masalah tersebut. Pengukuran hal-hal kualitatif merupakan hal yang sangat penting mengingat makin kompleksnya permasalahan di dunia dan tingkat ketidakpastian yang makin tinggi. Selain itu, AHP juga menguji konsistensi penilaian. Bila terjadi penyimpangan yang terlalu jauh dari nilai konsisten sempurna maka penilaian perlu diperbaiki atau hirarki harus distruktur ulang.

AHP adalah suatu model yang luwes yang memberikan kesempatan bagi perorangan atau kelompok untuk membangun gagasan-gggasan dan mendefinisikan persoalan dengan cara membuat asumsi mereka masing-masing

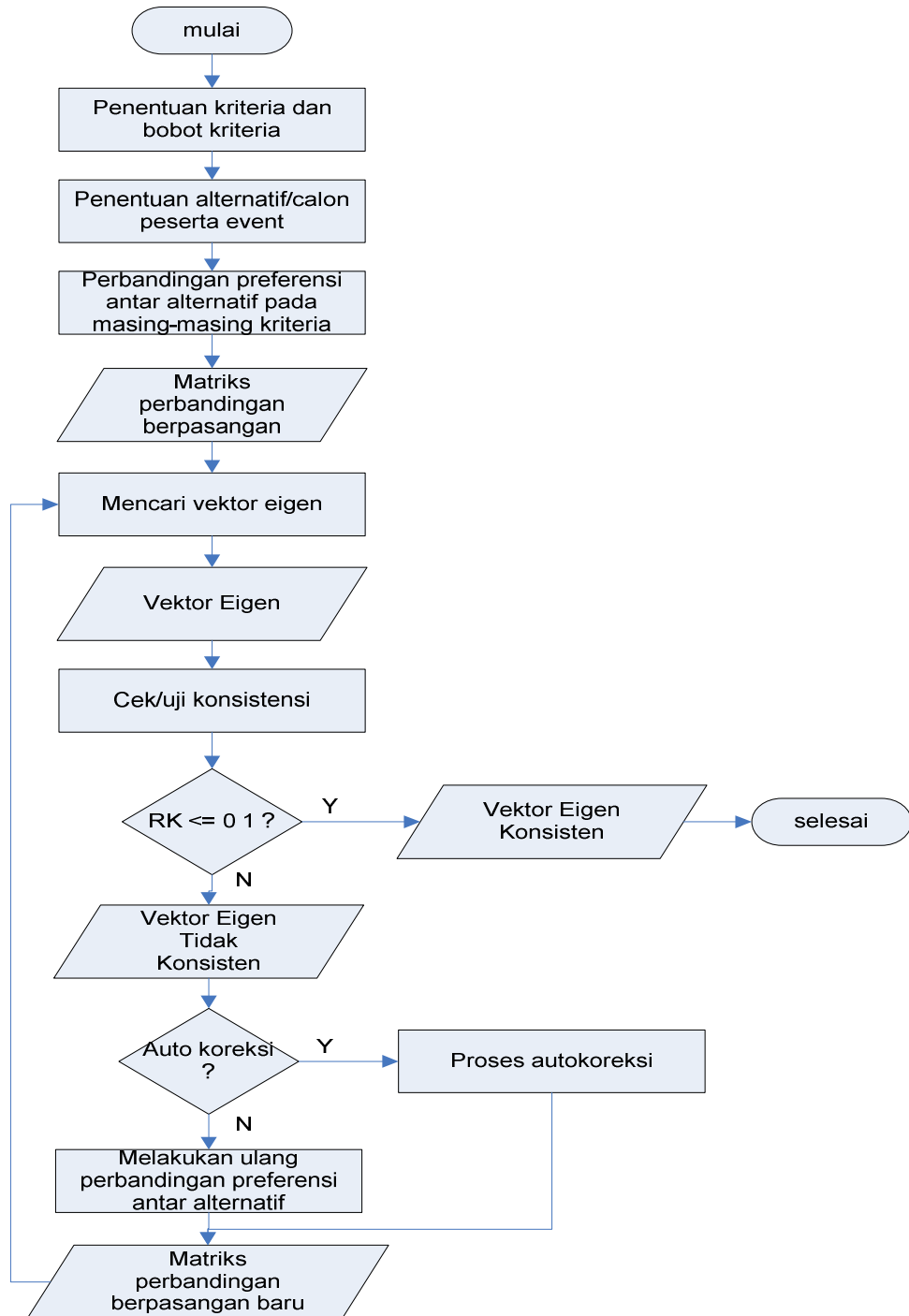
dan memperoleh pemecahan yang diinginkan darinya. Berbagai keunggulan AHP menurut Saaty (1993:5) adalah :

Tabel 3.1. Keunggulan AHP

No.	Prinsip	Penjelasan
1.	Kesatuan	AHP memberi satu model tunggal yang mudah dimengerti, luwes untuk aneka ragam persoalan terstruktur.
2.	Kompleksitas	AHP memadukan ancangan berdasarkan sistem dalam memecahkan persoalan kompleks.
3.	Saling ketergantungan	AHP dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam suatu sistem dan tidak memaksakan pemikiran linier.
4.	Penyusunan hierarki	AHP mencerminkan kecenderungan alamai pikiran untuk memilahmilih elemen-elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokkan unsur yang serupa dalam setiap tingkat.
5.	Pengukuran	AHP memberi suatu skala untuk mengukur hal-hal dan tanwujud suatu metode untuk menetapkan prioritas.
6.	Konsistensi	AHP melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan berbagai prioritas.
7.	Sintesis	AHP menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan setiap alternatif.
8.	Tawar Menawar	AHP mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai faktor sistem dan memungkinkan organisasi dapat memilih alternatif terbaik berdasar tujuan-tujuan mereka.
9.	Penilaian dan konsensus	AHP tak memaksakan konsensus tetapi mensintesiskan suatu hasil yang representatif dari berbagai penilaian yang berbeda-beda.
10.	Pengulangan proses	AHP memungkinkan orang memperhalus definisi mereka pada suatu persoalan dan memperbaiki pertimbangan dan pengertian mereka melalui pengulangan.

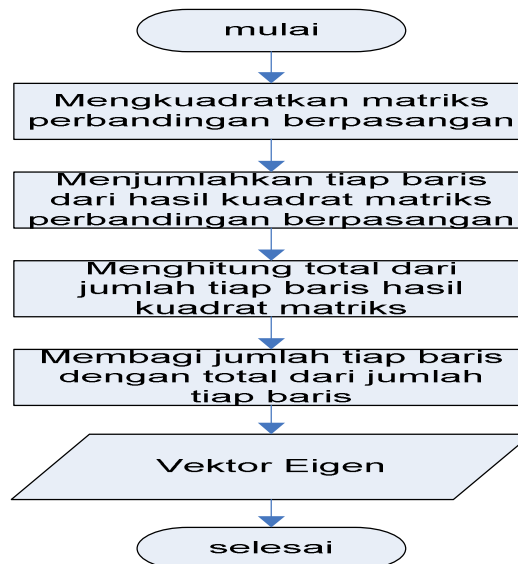
Sumber: Saaty (1993)

Proses untuk metode AHP dapat digambarkan seperti yang tampak pada Gambar 3.2.



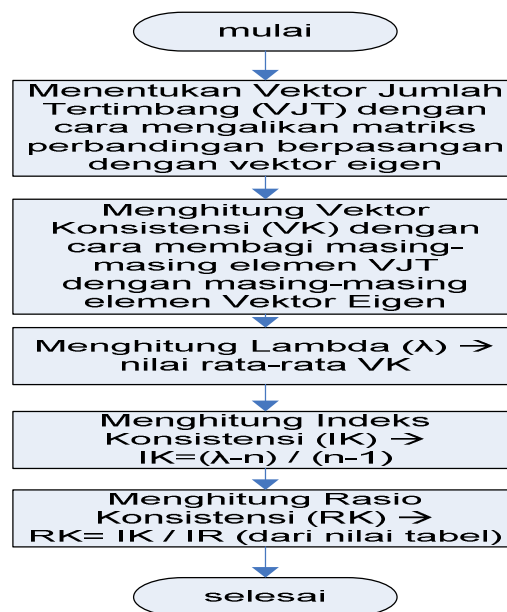
Gambar 3.2.
Bagan Alir Proses Metode AHP

Untuk proses mencari vektor eigen pada metode AHP dapat digambarkan seperti yang tampak pada Gambar 3.3.



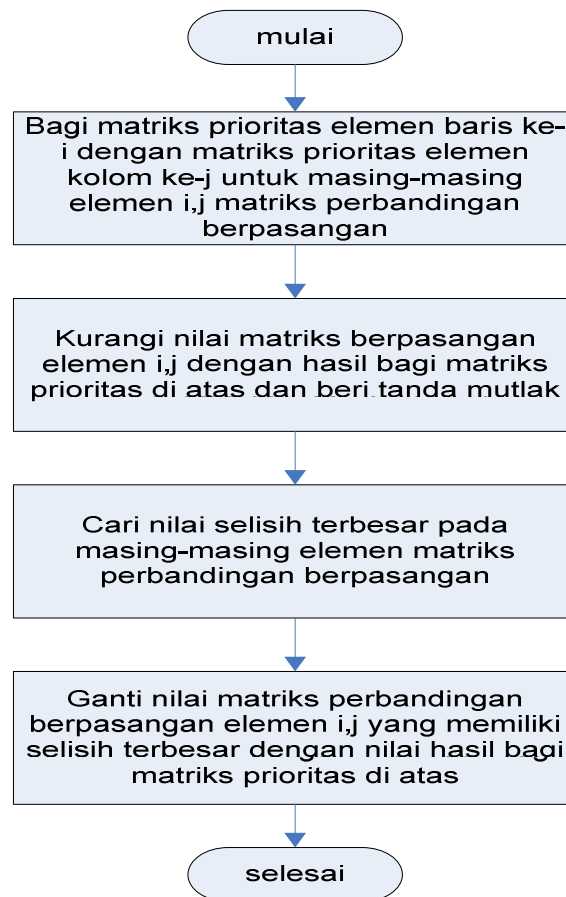
Gambar 3.3.
Bagan Alir Proses Mencari Vektor Eigen Pada Metode AHP

Untuk proses cek/uji konsistensi pada metode AHP dapat digambarkan seperti yang tampak pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4.
Bagan Alir Proses Uji/Cek Konsistensi Pada Metode AHP.

Untuk proses autokoreksi pada metode AHP dapat digambarkan seperti yang tampak pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5.
Bagan Alir Proses Autokoreksi Pada Metode AHP

Sebagaimana metode AHP yang dijelaskan oleh Saaty (1993:12), maka langkah-langkah yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan, kriteria, dan alternatif keputusan
2. Membuat “pohon hierarki” (*hierarchical tree*) untuk berbagai kriteria dan alternatif keputusan.

3. Membentuk sebuah matriks perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*), misalnya diberi nama matriks A. Angka di dalam baris ke-i dan kolom ke-j ($A_{i,j}$) merupakan *relative importance* A_i dibandingkan dengan A_j . Untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan Saaty dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Skala Penilaian Perbandingan

Intensitas Kepentingan	Keterangan
1	Kedua elemen sama pentingnya
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya
7	Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya
9	Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya
2,4,6,8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang berdekatan

Apabila suatu elemen dibandingkan dengan dirinya sendiri maka diberi nilai 1. Jika elemen i (A_i) dibandingkan dengan elemen j (A_j) mendapatkan nilai tertentu, maka A_j dibandingkan dengan A_i merupakan kebalikannya.

4. Membuat peringkat prioritas dari matriks pairwise dengan menentukan *eigenvector*. Caranya yaitu sebagai berikut:
- a. Mengkuadratkan matriks *pairwise comparison*
Prinsip umum perkalian matriks adalah perkalian antara baris dari matriks pertama dengan kolom dari matriks kedua.
 - b. Menjumlahkan setiap baris dari matriks hasil penguadratan cara (a), kemudian dinormalisasi, caranya yaitu membagi jumlah baris dengan total baris hingga diperoleh nilai *eigenvector* (1)

- c. Untuk mengecek ulang nilai *eigenvector*, matriks hasil penguadratan cara (a) dikuadratkan kembali dan lakukan kembali cara (b), hingga diperoleh *eigenvector* yang baru. Kemudian, bandingkan *eigenvector* pertama dan kedua. Jika di antara keduanya, tidak ada perubahan nilai atau hanya sedikit mengalami perubahan maka nilai *eigenvector* pertama sudah benar. Akan tetapi, jika sebaliknya, maka nilai *eigenvector* pertama masih salah dan lakukan kembali cara (a) sampai dengan (c), hingga nilai *eigenvector* tidak berubah atau hanya sedikit berubah.
5. Membuat peringkat alternatif dari matriks *pairwise* masing-masing alternatif dengan menentukan *eigenvector* setiap alternatif. Cara yang digunakan sama ketika membuat peringkat prioritas di atas.
- Menentukan matriks *pairwise comparisons* masing-masing alternatif
 - Menentukan nilai *eigenvector* masing-masing alternatif
 - Menentukan peringkat alternatif

Peringkat alternatif dapat ditentukan dengan mengalikan nilai *eigenvector* alternatif dengan nilai *eigenvector* kriteria.

6. Konsistensi Logis

Semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingatkan secara konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis. Matriks bobot yang diperoleh dari hasil perbandingan secara berpasangan tersebut harus mempunyai hubungan kardinal dan ordinal. Hubungan tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Hubungan kardinal: $a_{ij} \cdot a_{jk} = a_{ik}$

Hubungan ordinal : $A_i > A_j, A_j > A_k$ maka $A_i > A_k$

Hubungan diatas dapat dilihat dari dua hal sebagai berikut :

- a. Dengan melihat preferensi multiplikatif, misalnya bila anggur lebih enak empat kali dari mangga dan mangga lebih enak dua kali dari pisang maka anggur lebih enak delapan kali dari pisang.
- b. Dengan melihat preferensi transitif, misalnya anggur lebih enak dari mangga dan mangga lebih enak dari pisang maka anggur lebih enak dari pisang.

Pada keadaan sebenarnya akan terjadi beberapa penyimpangan dari hubungan tersebut, sehingga matriks tersebut tidak konsisten sempurna. Hal ini terjadi karena ketidakkonsistenan dalam preferensi seseorang. Untuk mengetahui apakah hasil penilaian bersifat konsisten, maka ada beberapa langkah untuk menghitung rasio inkonsistensi untuk menguji konsistensi penilaian atau konsistensi logis.

Penghitungan konsistensi logis dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan vektor jumlah tertimbang (*weighted sum vector*). Hal ini dilakukan dengan mengalikan baris pertama matriks prioritas dengan kolom pertama matriks perbandingan, kemudian baris kedua matriks prioritas dikalikan dengan kolom kedua matriks perbandingan, selanjutnya mengalikan baris ketiga matriks prioritas dengan kolom ketiga matriks perbandingan, dan seterusnya. Kemudian hasil perkalian tersebut dijumlahkan untuk setiap baris atau secara mendatar.
- b. Menghitung Vektor Konsistensi (VK)

Langkah berikutnya adalah membagi masing-masing elemen VK dengan masing-masing elemen matriks prioritas.

- c. Menghitung Lambda dan Indeks Konsistensi

Lambda (λ) adalah nilai rata-rata Vektor Konsistensi.

- d. Formula untuk menghitung Indeks Konsistensi adalah:

$$IK = \frac{\lambda - n}{n - 1} \dots\dots\dots(1)$$

dimana n adalah jumlah faktor yang sedang dibandingkan.

- e. Perhitungan rasio konsistensi.

Rasio Konsistensi merupakan Indeks Konsistensi dibagi dengan Indeks Random/Acak (IR). Untuk lebih jelasnya, lihat formula berikut ini.

$$RK = \frac{IK}{IR} \dots\dots\dots(2)$$

Indeks Random adalah fungsi langsung dari jumlah alternatif atau sistem yang sedang diperbandingkan. Indeks Random disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Nilai Indeks Random.

Ukuran Matriks	Nilai RI
1,2	0,00
3	0,58
4	0,90
5	1,12
6	1,24
7	1,32
8	1,41
9	1,45
10	1,49
11	1,51
12	1,48
13	1,56
14	1,57
15	1,59

Untuk metode AHP, tingkat inkonsistensi yang masih dapat diterima adalah sebesar 10% ke bawah. Jadi jika nilai $RK \leq 0,1$ (10%), maka hasil perbandingan preferensi konsisten dan sebaliknya jika $RK > 0,1$ (10%), maka hasil perbandingan preferensi tidak konsisten. Apabila tidak konsisten, maka terdapat 2 pilihan, yaitu mengulang perbandingan preferensi atau melakukan proses autokoreksi.

f. Penggabungan Pendapat Responden

Pada dasarnya AHP dapat digunakan untuk mengolah data dari satu responden ahli. Namun demikian dalam aplikasinya penilaian kriteria dan alternatif dilakukan oleh beberapa ahli multidisipliner. Konsekuensinya pendapat beberapa ahli tersebut perlu dicek konsistensinya satu persatu. Pendapat yang konsisten kemudian digabung dengan menggunakan rata-rata geometrik.

$$\overline{X}_G = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n X_i}$$

$$\overline{X}_G = \text{rata-rata geometric}$$

$$N = \text{jumlah responden}$$

$$X_i = \text{penilaian oleh responden ke - } i$$

Hasil penilaian gabungan ini kemudian diolah dengan prosedur AHP yang telah diuraikan sebelumnya.

3.4.1. Persamaan Matematik

Persamaan matematik yang digunakan untuk menyelesaikan AHP. Terdapat tiga langkah untuk menentukan besarnya bobot yang dimulai dari kasus yang sederhana sampai dengan kasus-kasus umum, sebagai berikut:

1. Langkah pertama:

$$w_i/w_j = a_{ij} \quad (i,j = 1,2,\dots,n)$$

w_i = bobot input dalam baris

w_j = bobot input dalam lajur

2. Langkah kedua:

$$w_i = a_{ij}w_j \quad (i,j = 1,2,\dots,n)$$

Untuk kasus-kasus umum mempunyai bentuk:

$$w_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a_{ij}w_j \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

w_i = rata-rata dari $a_{i1}, w_1, \dots, a_{in}, w_n$

3. Langkah ketiga

Bila perkiraan a_{ij} baik akan cenderung untuk dekat dengan nisbah w_i/w_j . Jika n juga berubah maka n diubah menjadi λ_{maks} sehingga diperoleh:

$$w_i = \frac{1}{\lambda_{maks}} \sum_{j=1}^n a_{ij}w_j \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

Pengolahan Horisontal:

Pengolahan horisontal dimaksudkan untuk menyusun prioritas elemen keputusan setiap tingkat hirarki keputusan. Tahapannya menurut Saaty (1983) adalah sebagai berikut:

1. Perkalian baris (z) dengan rumus:

$$z_i = \sqrt[n]{\prod_{j=1}^n a_{ij}}$$

2. Perhitungan vektor prioritas atau vektor eigen

$$eVP_i = \frac{\sqrt[n]{\prod_{j=1}^n a_{ij}}}{\sum_{i=1}^n \sqrt[n]{\prod_{j=1}^n a_{ij}}} \quad eVP_i \text{ adalah elemen vektor prioritas ke-}i$$

3. Perhitungan nilai eigen maksimum

$$VA = a_{ij} \times VP \text{ dengan } VA = (V_{ai})$$

$$VB = VA/VP \text{ dengan } VB = (V_{bi})$$

$$1_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a_{ij} \quad V_{bi} \text{ untuk } i = 1, 2, \dots, n$$

$$VA = VB = \text{Vektor antara}$$

4. Perhitungan indeks konsistensi (CI)

Pengukuran ini dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi jawaban yang akan berpengaruh kepada kesahihan hasil. Dengan rumus sebagai berikut:

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

Untuk mengetahui apakah CI dengan besaran tertentu cukup baik atau tidak perlu diketahui rasio yang dianggap baik, yaitu apabila $CR \leq 0.1$. rumus

CR adalah:

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Pengolahan Vertikal

Pengolahan ini digunakan untuk menyusun prioritas setiap elemen dalam hirarki terhadap sasaran utama. Jika NP_{pq} didefinisikan sebagai nilai prioritas pengaruh elemen ke-p pada tingkat ke q terhadap sasaran utama, maka:

$$NP_{pq} = \sum^s NPH_{pq}(t, q-1) \times NPT_t(q-1)$$

Untuk $p = 1, 2, \dots, r$

$T = 1, 2, \dots, r$

Dimana:

NP_{pq} = nilai prioritas pengaruh elemen ke-p pada tingkat ke-q terhadap sasaran utama.

NPH_{pq} = nilai prioritas elemen ke-p pada tingkat ke-q

NPT_t = nilai prioritas pengaruh elemen ke-t pada tingkat q-1

3.4.2. Aksioma-aksioma AHP

Aksioma adalah sesuatu yang tidak dapat dibantah kebenarannya atau yang pasti terjadi. Dalam ilmu ukur dikenal suatu aksioma bahwa diantara dua titik hanya dapat dilewati sebuah garis lurus. Atau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya matahari terbit ditimur dan terbenam dibarat. Ada empat buah aksiomayangharus diperhatikan para pemakai model AHP dan pelanggaran dari setiap aksioma berakibat tidak validnya model yang dipakai (Hastarini, 2008). Keempat aksioma tersebut adalah:

1. Aksioma 1

Reciprocal Comparison, artinya si pengambil keputusan harus bias membuat perbandingan dan menyatakan preferensinya. Preferensi itu sendiri harus memenuhi syarat resiprokal yaitu kalau A lebih disukai dari B dengan skala x , maka B lebih disukai dari A dengan skala $1/x$.

2. Aksioma 2

Homogeneity, artinya preferensi seseorang harus dapat dinyatakan dalam skala terbatas atau dengan kata lain elemen-elemennya dapat dibandingkan satu sama lain. Kalau aksioma ini tidak dapat dipenuhi maka elemen-elemen yang dibandingkan tersebut tidak homogenous dan harus dibentuk Suatu cluster (kelompok elemen-elemen) yang baru.

3. Aksioma 3

Independence, artinya preferensi dinyatakan dengan mengasumsikan bahwa kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang ada melainkan oleh objektif secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa pola ketergantungan atau pengaruh dalam model AHP adalah searah ke atas, Artinya perbandingan antara elemen-elemen dalam satu level dipengaruhi atau tergantung oleh elemen-elemen dalam level di atasnya.

4. Aksioma 4

Expectations, artinya untuk tujuan pengambilan keputusan, struktur hirarki diasumsikan lengkap. Apabila asumsi ini tidak dipenuhi maka si pengambil keputusan tidak memakai seluruh kriteria dan atau objektif yang tersedia atau diperlukan sehingga keputusan yang diambil dianggap tidak lengkap.

3.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jakarta dan sekitarnya, khususnya di lingkungan akademik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan dan sekaligus menyelesaikan penelitian ini adalah selama satu semester, yaitu mulai bulan Januari sampai dengan Juli 2014. Namun demikian, diharapkan sebelum bulan Juli sudah diperoleh hasil sementara dari kajian ini.

3.6. Organisasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian akademik sebagai tugas akhir yang dilakukan peneliti sebagai mahasiswa pada Program Studi Magister Akuntansi di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Analisis Prioritas Kriteria dan Faktor-faktor dalam Pemilihan Metode Pembebanan Pajak Penghasilan (PPh)

Prioritas kriteria yang digunakan untuk menganalisis model pemilihan metode pembebanan PPh dengan menggunakan *analytical hierarchy process* (AHP) yaitu *Balancesheet Approach* dan *Income Statement Approach*. Pemilihan kriteria dan faktor-faktor/alternatif metode alokasi pembebanan PPh dilakukan melalui evaluasi terhadap kondisi yang ada pada saat ini dan klarifikasi terhadap rumusan masalah selama penelitian berlangsung dengan menggunakan preferensi multiplikatif dari sepuluh orang ahli (*expert*) dibidang akuntansi dan perpajakan.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan sebagai alternatif pemilihan metode pembebanan PPh, adalah perbedaan 6 metode alokasi pembebanan PPh dalam penyajian laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, terdiri dari:

1. Metode Aset-Laibilitas (*Assets-Liabilities*)
2. Metode Tangguhan (*Deferred*)
3. Metode Bersih dari Pajak (*Net-of-Tax*)
4. Metode Alokasi Parsial (*Partial Allocation*)
5. Metode Alokasi Intra Periode (*Intra Period*)
6. Metode Non-Alokasi (*Non Allocation*)

Matrik perbandingan kriteria dan faktor-faktor yang diturunkan dari alur pikir model pembebanan pajak penghasilan dalam kerangka *analytical hierarchy process*, terdapat pada tabel 4.1. di bawah ini.

Tabel 4.1. Perbandingan Metode-Metode Pembebanan PPh: Efek terhadap Penyajian Laporan Keuangan

Hal	Alokasi					Non-alokasi
	Antar Periode				Intra Periode	
	Komprehensif			Parsial		
	Bersih dari Pajak	Tanggungan	Aset-Laibilitas			
Efek terhadap Penyajian Laporan Laba Rugi						
Beban PPh	PPh komersil = PPh fiskal	PPh komersil \neq PPh fiskal	PPh komersil \neq PPh fiskal	PPh komersil \neq PPh fiskal	PPh komersil = PPh fiskal	PPh komersil = PPh fiskal
Jumlah Penghasilan	Penghasilan bersih setelah dikurangi konsekuensi PPh	Sebesar pengakuan transaksi	Sebesar pengakuan transaksi	Sebesar pengakuan transaksi	Penghasilan minus konsekuensi pajak.	Sebesar pengakuan transaksi
Jumlah Biaya / Beban	Biaya bersih setelah dikurangi beban PPh	Sebesar pengakuan transaksi	Sebesar pengakuan transaksi	Sebesar pengakuan transaksi	Biaya minus konsekuensi pajak.	Sebesar pengakuan transaksi
Efek terhadap Penyajian Laporan Posisi Keuangan						
PPh dibayar di muka	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada	Ada
Laibilitas PPh	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
PPh Ditangguhkan	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Besarnya Laba Bersih yang Masuk Ke Akun Laba yang Ditahan	Sama dengan laba komersil, tidak sama dengan laba fiskal.	Sama dengan laba komersil, tidak sama dengan laba fiskal.	Sama dengan laba komersil, tidak sama dengan laba fiskal.	Sama dengan laba komersil, tidak sama dengan laba fiskal.	Sama dengan laba komersil, tidak sama dengan laba fiskal.	Sama dengan laba komersil, tidak sama dengan laba fiskal.
Keterangan	Aset, Laibilitas dan	Efek perbedaan	PPh ditangguhkan	PPh ditangguhkan	Semua konsekuensi	Menganggap

	Ekuitas disajikan bersih dari efek pajak.	perhitungan PPh antara komersil dan fiskal hanya pada laporan laba rugi.	(yang berasal dari akumulasi perbedaan waktu periode sebelumnya dan periode berjalan) diakui sebagai aset bila bersaldo debit dan sebagai laibilitas bila bersaldo kredit.	hanya meliputi perbedaan waktu pada periode berjalan (tanpa efek yang berasal dari periode sebelumnya). Diakui sebagai aset bila bersaldo debit dan laibilitas bila bersaldo kredit.	Pajak yang timbul dialokasikan langsung pada transaksi yang bersangkutan.	beban PPh sebagaimana beban pada umumnya, tidak memperhatikan perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara komersil dan fiskal.
PPh komersil	: Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan laporan laba rugi yang disusun menurut kaidah PSAK.					
PPh fiskal	: Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan perhitungan menurut ketentuan perpajakan.					

Tabel 4.2. Ilustrasi Perbedaan Enam Metode Alokasi Pembebanan PPh dalam Penyajian Laporan Laba Rugi dan Laporan Posisi Keuangan

	Alokasi Komprehensif Antar Periode			Alokasi Komprehensif Intra Periode	Alokasi Parsial	Non Alokasi
	Tanggungan	Aset-Laibilitas	Bersih dari Pajak			
Efek terhadap Penyajian Laporan Laba Rugi / <i>Income Statement Approach</i> (dalam ribuan)						
Penghasilan sebelum beda waktu dan PPh	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-
Perbedaan waktu	(100.000,-)	(100.000,-)	(107.500,-)	(107.500,-)	(107.500,-)	(107.500,-)
Penghasilan sebelum PPh	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-	Rp 892.500,-	Rp 892.500,-	Rp 892.500,-	Rp 892.500,-
Beban PPh kini	350.000,-	350.000,-	350.000,-	350.000,-	350.000,-	350.000,-
Beban PPh tanggungan	7.500,-	7.500,-	-	-	7.500,-	-
Total beban PPh	(357.500,-)	(357.500,-)	(350.000,-)	(350.000,-)	(357.500,-)	(350.000,-)
Laba bersih	Rp 542.500,-	Rp 542.500,-	Rp 542.500,-	Rp 542.500,-	Rp 535.000,-	Rp 542.500,-
Efek terhadap Penyajian Laporan Posisi Keuangan / <i>Balancesheet Approach</i> (dalam ribuan)						
Saldo Aset Sebelum Efek Metode Pembebanan PPh	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-
Aset PPh Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-
Saldo Aset Setelah Efek Metode Pembebanan PPh	4.900.000,-	4.900.000,-	4.550.000,-	4.900.000,-	4.900.000,-	4.900.000,-
Laibilitas Sebelum Efek Metode Pembebanan PPh	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-
Laibilitas PPh Ditangguhkan	-	7.500,-	-	-	7.500,-	-
Laibilitas Setelah Efek Metode Pembebanan PPh	Rp 2.850.000,-	Rp 2.857.500,-	Rp 2.150.000,-	Rp 2.850.000,-	Rp 2.857.500,-	Rp 2.850.000,-
Ekuitas Sebelum Efek Metode Pembebanan PPh	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-
Ekuitas Setelah Efek Metode Pembebanan PPh	Rp 2.050.000,-	Rp 2.042.500,-	Rp 2.400.000,-	Rp 2.050.000,-	Rp 2.042.500,-	Rp 2.050.000,-

Sebagai tambahan ilustrasi dari perbedaan 6 metode alokasi pembebanan PPh dalam penyajian laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan yaitu, asumsi perbedaan waktu disebabkan karena penambahan aset tetap yang dibeli pada tanggal 2 Januari 2014 senilai Rp 500.000,- umur manfaat lima tahun tanpa nilai sisa (sehingga depresiasi per tahun @ Rp 100.000,-). Metode depresiasi garis lurus digunakan untuk menyusutkan aset ini. Perhitungan depresiasi menurut pajak sebesar Rp 125.000,- per tahun (untuk umur manfaat 4 tahun, termasuk kelompok 1 menurut ketentuan depresiasi pajak). Selisih depresiasi pajak dan akuntansi adalah Rp 100.000,-, dikalikan tarif pajak tangguhan tahun 2014 yaitu 30%, sama dengan Rp 30.000,- dialokasi selama 4 tahun sebesar Rp 7.500,- sehingga perbedaan waktu bersih sebesar Rp 107.500,-.

4.1.1. Perhitungan Faktor Pembobotan Hirarki untuk Semua Kriteria

Hasil analisis preferensi multiplikatif menunjukkan bahwa, kriteria *Income Statement Approach* 7 kali lebih penting dibandingkan dengan kriteria *Balancesheet Approach*. Maka matriks perbandingan hasil preferensi kriteria ada pada tabel 4.3. berikut:

Tabel 4.3. Matriks Faktor Pembobotan Hirarki untuk Semua Kriteria

	<i>Balancesheet Approach</i>	<i>Income Statement Approach</i>
<i>Balancesheet Approach</i>	1	1/7
<i>Income Statement Approach</i>	7	1

Tabel 4.4. Matriks Faktor Pembobotan Hirarki untuk Semua Kriteria yang disederhanakan

	<i>Balancesheet Approach</i>	<i>Income Statement Approach</i>
<i>Balancesheet Approach</i>	1.000	0.143
<i>Income Statement Approach</i>	7.000	1.000
Σ	8.00	1.14

Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan jumlah kolom yang bersangkutan, akan diperoleh bobot relatif yang dinormalkan. Nilai *vektor eigen* dihasilkan dari rata-rata bobot relatif untuk setiap baris. Hasilnya terdapat pada tabel 4.5. berikut ini:

Tabel 4.5. Matriks Faktor Pembobotan Hirarki untuk Semua Kriteria yang dinormalkan

	<i>Balancesheet Approach</i>	<i>Income Statement Approach</i>	Vektor Eigen (yang dinormalkan)
<i>Balancesheet Approach</i>	0.125	0.125	0.125
<i>Income Statement Approach</i>	0.875	0.875	0.875

Selanjutnya nilai eigen maksimum ($\lambda_{maksimum}$) didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom dengan vektor eigen. Nilai eigen maksimum yang dapat diperoleh adalah:

$$\lambda_{maksimum} = (8 \times 0.125) + (1.14 \times 0.875) = 2.000$$

Karena matriks berordo 2 (yakni terdiri dari 2 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh:

$$CI = \frac{\lambda \max - n}{n - 1} = \frac{2.000 - 2}{2 - 1} = 0.000$$

Untuk $n = 2$, $RI = 0.000$ (tabel Saaty), maka:

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.000}{0.000} = 0 < 0.100$$

Karena $CR < 0.100$ berarti preferensi responden adalah konsisten.

Dari hasil perhitungan pada tabel di atas menunjukkan bahwa, kriteria *Income Statement Approach* merupakan kriteria prioritas untuk pembebanan pajak penghasilan, dengan bobot 0,875 atau 87,5% dibandingkan dengan kriteria *Balancesheet Approach* dengan nilai bobot 0,125 atau 12,5%.

4.1.2. Vektor Prioritas

Untuk memperoleh vektor prioritas, setiap unsur pada tabel 4.6, disetiap baris dikalikan dan selanjutnya ditarik akar berpangkat n . Hasil dari setiap baris ini kemudian dibagi dengan jumlah dari hasil semua baris.

Tabel 4.6. Matriks Vektor Prioritas

	<i>Balancesheet Approach</i>	<i>Income Statement Approach</i>
<i>Balancesheet Approach</i>	1.000	0.143
<i>Income Statement Approach</i>	7.000	1.000

Dengan demikian dapat diperoleh vektor prioritasnya, yaitu:

$$\sqrt[2]{1 \times 0.143} = 0.378$$

$$\sqrt[2]{7 \times 1} = 2.646$$

$$\Sigma = 3.024$$

Vektor Prioritas :

$$0.378 : 3.024 = 0.125$$

$$2.646 : 3.024 = 0.875$$

Komparabilitas atas *balancesheet approach* dan *income statement approach* memiliki hubungan yang memberi kontribusi terhadap proses penghubungan antara dua atau lebih data finansial. Nilai informasi dari data mengacu pada aplikasi yang sama dalam praktik akuntansi atas kejadian tertentu. Kedua kriteria yang dipasangkan tersebut kedudukannya saling melengkapi karena merupakan proses yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca/laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

Vektor prioritas menunjukkan bahwa kriteria *Income statement approach* memiliki preferensi multiplikatif prioritas lebih dominan dari *balancesheet approach* dalam pemilihan metode pembebanan pajak penghasilan. Analisis para ahli terhadap sasaran utama pelaporan keuangan adalah terletak pada informasi tentang kinerja perusahaan yang disajikan melalui pengukuran laba dan komponennya. Selain itu, laporan laba rugi adalah pengukur efisiensi manajemen, meramalkan keadaan usaha dan distribusi modal dari periode ke periode dan pengukur keberhasilan. Data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto dijadikan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Dalam kaitan tersebut, laibilitas PPh badan dan bentuk usaha tetap dalam mekanisme *balancesheet approach* nampak lebih kompleks. Hal ini mengingat adanya beberapa perlakuan atas kebijakan akuntansi yang diperhitungkan dalam prosedur penghitungan pajak terutang. Kebijakan tersebut seperti depresiasi dan amortisasi aset tetap, sistem penilaian persediaan barang dan asas pembukuan, untuk mengakui saat pajak terutang. Untuk mengakomodir beda waktu antara akuntansi dan pembukuan pajak dalam mengakui penghasilan dan biaya, diperlukan akun *intermediary* yang disajikan pada laporan posisi keuangan sebagai aset dan liabilitas pajak tangguhan.

4.1.3. Perhitungan Faktor Evaluasi untuk Kriteria *Balancesheet Approach*

Perbandingan berpasangan untuk kriteria *balancesheet approach* pada 6 jenis metode pembebanan pajak penghasilan, adalah sebagai berikut.

Tabel 4.7. Matriks Faktor Evaluasi untuk Kriteria *Balancesheet Approach*

	Aset-Liabilitas	Tangguhan	Bersih dari Pajak	Alokasi Parsial	Alokasi Intra Periode	Non Alokasi
Aset-Liabilitas	1	2	2	2	2	2
Tangguhan	½	1	2	2	2	2
Bersih dari Pajak	½	½	1	2	2	½
Alokasi Parsial	½	½	½	1	2	2
Alokasi Intra Periode	½	½	½	½	1	2
Non Alokasi	½	½	2	½	½	1

Perhitungan matriks untuk kriteria *balancesheet approach* adalah:

Tabel 4.8. Matriks Faktor Evaluasi untuk Kriteria *Balancesheet Approach* yang disederhanakan

	Aset-Liabilitas	Tanggungan	Bersih dari Pajak	Alokasi Parsial	Alokasi Intra Periode	Non Alokasi
Aset-Liabilitas	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Tanggungan	0.500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bersih dari Pajak	0.500	0.500	1.000	2.000	2.000	0.500
Alokasi Parsial	0.500	0.500	0.500	1.000	2.000	2.000
Alokasi Intra Periode	0.500	0.500	0.500	0.500	1.000	2.000
Non Alokasi	0.500	0.500	2.000	0.500	0.500	1.000
Σ	3.500	5.000	8.000	8.000	9.500	9.500

Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan jumlah total pada kolom yang bersangkutan, akan diperoleh bobot relatif yang dinormalkan. Nilai vektor eigen dihasilkan dari rata-rata nilai bobot relatif untuk tiap baris. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9. Matriks Faktor Evaluasi untuk Kriteria *Balancesheet Approach* yang dinormalkan

	Aset-Liabilitas	Tanggungan	Bersih dari Pajak	Alokasi Parsial	Alokasi Intra Periode	Non Alokasi	Vektor Eigen (yang dinormalkan)
Aset-Liabilitas	0.286	0.400	0.250	0.250	0.211	0.211	0.268
Tanggungan	0.143	0.200	0.250	0.250	0.211	0.211	0.211
Bersih dari Pajak	0.143	0.100	0.125	0.250	0.211	0.053	0.147
Alokasi Parsial	0.143	0.100	0.063	0.125	0.211	0.211	0.142
Alokasi Intra Periode	0.143	0.100	0.063	0.063	0.105	0.211	0.114
Non Alokasi	0.143	0.100	0.250	0.063	0.053	0.105	0.119

Selanjutnya nilai eigen maksimum ($\lambda_{\text{maksimum}}$) didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom dengan vektor eigen. Nilai eigen maksimum yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\lambda_{\text{maksimum}} &= (3.500 \times 0.268) + (5.000 \times 0.211) + (8.000 \times 0.147) + (8.000 \times \\ &0.142) + (9.500 \times 0.114) + (9.500 \times 0.119) \\ &= 6.512\end{aligned}$$

Karena matriks berordo 6 (yakni terdiri dari 6 alternatif), maka nilai indeks konsistensinya (CI) yang diperoleh adalah:

$$CI = \frac{\lambda_{\text{max}} - n}{n - 1} = \frac{6.512 - 6}{6 - 1} = 0.102$$

Untuk $n = 6$, $RI = 1.24$ (tabel Saaty), maka:

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.102}{1.24} = 0.083 < 0.100$$

Karena $CR < 0.100$ berarti preferensi responden adalah konsisten.

Dari hasil perhitungan faktor evaluasi untuk kriteria *balancesheet approach* diperoleh urutan prioritas metode pembebanan pajak penghasilan, yaitu: metode aset-liabilitas menjadi prioritas pertama dengan nilai bobot 0,268 atau 26,8%, kemudian metode tangguhan menjadi prioritas kedua dengan nilai bobot 0,211 atau 21,1%, metode bersih dari pajak menjadi prioritas ketiga dengan nilai bobot 0,147 atau 14,7%, sedangkan metode alokasi parsial, metode non alokasi dan metode alokasi intra periode menjadi prioritas keempat, kelima dan keenam dengan nilai bobot masing-masing sebesar 0,142 atau 14,2%, kemudian 0,119 atau 11,9% dan 0,114 atau 11,4%.

4.1.4. Perhitungan Faktor Evaluasi untuk Kriteria *Income Statement*

Approach

Perbandingan berpasangan untuk kriteria *income statement approach* pada 6 jenis metode pembebanan pajak penghasilan, adalah sebagai berikut.

Tabel 4.10. Matriks Faktor Evaluasi untuk Kriteria *Income Statement Approach*

	Aset-Liabilitas	Tanggunghan	Bersih dari Pajak	Alokasi Parsial	Alokasi Intra Periode	Non Alokasi
Aset-Liabilitas	1	2	½	2	2	2
Tanggunghan	½	1	2	2	2	2
Bersih dari Pajak	2	½	1	½	2	2
Alokasi Parsial	½	½	2	1	2	2
Alokasi Intra Periode	½	½	½	½	1	2
Non Alokasi	½	½	½	½	½	1

Perhitungan matriks untuk kriteria *income statement approach* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11. Matriks Faktor Evaluasi untuk Kriteria *Income Statement Approach* yang disederhanakan

	Aset-Liabilitas	Tanggunghan	Bersih dari Pajak	Alokasi Parsial	Alokasi Intra Periode	Non Alokasi
Aset-Liabilitas	1.000	2.000	0.500	2.000	2.000	2.000
Tanggunghan	0.500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bersih dari Pajak	2.000	0.500	1.000	0.500	2.000	2.000
Alokasi Parsial	0.500	0.500	2.000	1.000	2.000	2.000
Alokasi Intra Periode	0.500	0.500	0.500	0.500	1.000	2.000
Non Alokasi	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	1.000
Σ	5.000	5.000	6.500	6.500	9.500	11.000

Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan jumlah total pada kolom yang bersangkutan, akan diperoleh bobot relatif yang dinormalkan. Nilai vektor

eigen dihasilkan dari rata-rata nilai bobot relatif untuk tiap baris. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12. Matriks Faktor Evaluasi untuk Kriteria *Income Statement Approach* yang dinormalkan

	Aset-Liabilitas	Tanggunghan	Bersih dari Pajak	Alokasi Parsial	Alokasi Intra Periode	Non Alokasi	Vektor Eigen (yang dinormalkan)
Aset-Liabilitas	0.200	0.400	0.077	0.308	0.211	0.182	0.229
Tanggunghan	0.100	0.200	0.308	0.308	0.211	0.182	0.218
Bersih dari Pajak	0.400	0.100	0.154	0.077	0.211	0.182	0.187
Alokasi Parsial	0.100	0.100	0.308	0.154	0.211	0.182	0.176
Alokasi Intra Periode	0.100	0.100	0.077	0.077	0.105	0.182	0.107
Non Alokasi	0.100	0.100	0.077	0.077	0.053	0.091	0.083

Selanjutnya nilai eigen maksimum ($\lambda_{\text{maksimum}}$) didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom dengan vektor eigen. Nilai eigen maksimum yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\lambda_{\text{maksimum}} &= (5.000 \times 0.229) + (5.000 \times 0.218) + (6.500 \times 0.187) + (6.500 \times \\ &0.176) + (9.500 \times 0.107) + (11.000 \times 0.083) \\ &= 6.522\end{aligned}$$

Karena matriks berordo 6 (yakni terdiri dari 6 alternatif), maka nilai indeks konsistensinya (CI) yang diperoleh adalah:

$$CI = \frac{\lambda_{\text{max}} - n}{n - 1} = \frac{6.522 - 6}{6 - 1} = 0.104$$

Untuk $n = 6$, $RI = 1.24$ (tabel Saaty), maka:

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.104}{1.24} = 0,084 < 0.100$$

Karena $CR < 0,100$ berarti preferensi responden adalah konsisten.

Dari hasil perhitungan faktor evaluasi untuk kriteria *income statement approach* diperoleh urutan prioritas metode pembebanan pajak penghasilan, yaitu: metode aset-liabilitas menjadi prioritas pertama dengan nilai bobot 0,229 atau 22,9%, kemudian metode tangguhan menjadi prioritas kedua dengan nilai bobot 0,218 atau 21,8%, dan metode bersih dari pajak menjadi prioritas ketiga dengan nilai bobot 0,187 atau 18,7%, sedangkan metode alokasi parsial, metode alokasi intra periode dan metode non alokasi menjadi prioritas keempat, kelima dan keenam dengan nilai bobot masing-masing sebesar 0,176 atau 17,6%, kemudian 0,107 atau 10,7% dan 0,083 atau 8,30%.

4.1.5. Perhitungan Total Ranging/Prioritas Global

4.1.5.1. Faktor Evaluasi Total

Dari seluruh evaluasi yang dilakukan terhadap kedua kriteria yaitu *balancesheet approach* dan *income statement approach*, yang selanjutnya dikalikan dengan vektor prioritas. Dengan demikian kita peroleh hubungan antara kriteria dengan alternatif, sebagaimana terdapat dalam tabel 4.13. di bawah ini.

Tabel 4.13. Matriks Hubungan antara Kriteria dengan Alternatif

	<i>Balancesheet Approach</i>	<i>Income Statement Approach</i>
Aset-Liabilitas	0.268	0.229
Tangguhan	0.211	0.218
Bersih dari Pajak	0.147	0.187
Alokasi Parsial	0.142	0.176
Alokasi Intra Periode	0.114	0.107
Non Alokasi	0.119	0.083

4.1.5.2. Total Rangking

Untuk mencari total rangking terhadap masing-masing metode pembebanan pajak penghasilan adalah dengan cara mengalikan faktor evaluasi masing masing alternatif dengan faktor bobot.

$$\begin{bmatrix} 0,268 & 0,229 \\ 0,211 & 0,218 \\ 0,147 & 0,187 \\ 0,142 & 0,176 \\ 0,114 & 0,107 \\ 0,119 & 0,083 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0,125 \\ 0,875 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,234 \\ 0,217 \\ 0,182 \\ 0,171 \\ 0,108 \\ 0,087 \end{bmatrix}$$

Bobot evaluasi untuk masing-masing alternatif dapat diperhitungkan secara terperinci, sebagai berikut:

Tabel 4.14. Total Rangking untuk Metode Aset-Liabilitas

	Faktor Evaluasi	Faktor Bobot	Bobot Evaluasi
<i>Balancesheet Approach</i>	0.268	0.125	0.033
<i>Income Statement Approach</i>	0.229	0.875	0.201
Σ		1.000	0.234

Tabel 4.15. Total Rangking untuk Metode Tangguhan

	Faktor Evaluasi	Faktor Bobot	Bobot Evaluasi
<i>Balancesheet Approach</i>	0.211	0.125	0.026
<i>Income Statement Approach</i>	0.218	0.875	0.191
Σ		1.000	0.217

Tabel 4.16. Total Ranging untuk Metode Bersih dari Pajak

	Faktor Evaluasi	Faktor Bobot	Bobot Evaluasi
<i>Balancesheet Approach</i>	0.147	0.125	0.018
<i>Income Statement Approach</i>	0.187	0.875	0.164
Σ		1.000	0.182

Tabel 4.17. Total Ranging untuk Metode Alokasi Parsial

	Faktor Evaluasi	Faktor Bobot	Bobot Evaluasi
<i>Balancesheet Approach</i>	0.142	0.125	0.018
<i>Income Statement Approach</i>	0.176	0.875	0.154
Σ		1.000	0.171

Tabel 4.18. Total Ranging untuk Metode Alokasi Intra Periode

	Faktor Evaluasi	Faktor Bobot	Bobot Evaluasi
<i>Balancesheet Approach</i>	0.114	0.125	0.014
<i>Income Statement Approach</i>	0.107	0.875	0.093
Σ		1.000	0.108

Tabel 4.19. Total Ranging untuk Metode Non Alokasi

	Faktor Evaluasi	Faktor Bobot	Bobot Evaluasi
<i>Balancesheet Approach</i>	0.119	0.125	0.015
<i>Income Statement Approach</i>	0.083	0.875	0.073
Σ		1.000	0.087

4.1.5.3. Prioritas Metode Pembebanan Pajak Penghasilan

Dari hasil perhitungan matematis di atas diketahui bahwa, prioritas utama untuk alternatif pemilihan metode pembebanan PPh adalah metode aset-liabilitas dengan nilai bobot evaluasi sebesar 0,234 atau 23,4%, kemudian metode tangguhan menjadi prioritas kedua dengan nilai bobot 0,217 atau 21,7%, dan metode bersih dari pajak menjadi prioritas ketiga dengan nilai bobot 0,182 atau 18,2%, sedangkan metode alokasi parsial, metode alokasi intra periode dan metode non alokasi menjadi prioritas keempat, kelima dan keenam dengan nilai bobot masing-masing sebesar 0,171 atau 17,1%, kemudian 0,108 atau 10,8% dan 0,087 atau 8,70%. Ikhtisar urutan prioritas dalam pemilihan metode pembebanan pajak penghasilan ada pada tabel 4.20. berikut:

Tabel 4.20. Urutan Prioritas Metode Pembebanan Pajak Penghasilan

Urutan Prioritas	Metode Pembebanann PPh	Bobot Evaluasi	Prosesntase
I	Aset-Liabilitas	0.234	23%
II	Tangguhan	0.217	22%
III	Bersih dari Pajak	0.182	18%
IV	Alokasi Parsial	0.171	17%
V	Alokasi Intra Periode	0.108	11%
VI	Non Alokasi	0.087	9%
Σ		1.000	100%

Secara umum metode-metode pembebanan PPh dengan alokasi komprehensif antar periode menjadi preferensi utama para ahli, dengan nilai tertinggi ada pada alternatif metode aset-liabilitas. Tidak terdapat nilai yang dominan pada masing-masing alternatif metode tersebut, oleh karena itu manajemen dapat menentukan pilihan metode pembebanan PPh yang bertujuan untuk mengurangi dampak dari

keterbatasan konservatisme dalam rangka penyajian laporan keuangan terhadap efektifitas hasil dari analisis finansial.

4.1.6. Perhitungan Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode-metode Pembebanan Pajak Penghasilan

Kerangka konseptual dari metode-metode pembebanan pajak penghasilan dirumuskan dari teori akuntansi, yang kemudian dijabarkan menjadi sub alternatif dari metode-metode pembebanan PPh. Masing-masing sub alternatif digunakan sebagai dasar berpikir untuk menentukan metode pembebanan PPh yang paling tepat, sebagai dampak dari pelaporan akuntansi dalam perilaku pengambilan keputusan bisnis dan penentuan jumlah pajak.

4.1.6.1. Perhitungan Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Aset-Liabilitas

Konsep dasar dari alternatif metode aset-liabilitas adalah estimasi pajak aktual yang akan dibayar pada tahun mendatang. Akuntansi pajak tangguhan komprehensif dianut, mengartikan bahwa semua efek PPh atas penghasilan, beban, keuntungan, kerugian dan semua komponen yang mempengaruhi perbedaan antara pelaporan pajak dengan akuntansi dilaporkan dalam laporan keuangan. Alokasi pajak antar periode dianut untuk memperhitungkan perbedaan waktu yang mempengaruhi perhitungan beban pajak pada tahun berjalan. Beban PPh tidak sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan. Ide dasar tersebut kemudian dimasukkan dalam perbandingan berpasangan untuk sub alternatif metode aset-liabilitas, sebagai berikut:

Tabel 4.21. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Aset-Liabilitas

	Estimasi pajak aktual tahun mendatang.	Implementasi akuntansi pajak tangguhan komprehensif.	Alokasi pajak antar periode.	Beban PPh tidak sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.
Estimasi pajak aktual tahun mendatang.	1	2	2	2
Implementasi akuntansi pajak tangguhan komprehensif.	$\frac{1}{2}$	1	2	2
Alokasi pajak antar periode.	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	2
Beban PPh tidak sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1

Perhitungan matriks untuk sub alternatif metode aset-liabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Aset-Liabilitas yang disederhanakan

	Estimasi pajak aktual tahun mendatang.	Implementasi akuntansi pajak tangguhan komprehensif.	Alokasi pajak antar periode.	Beban PPh tidak sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan
Estimasi pajak aktual tahun mendatang.	1.000	2.000	2.000	2.000
Implementasi akuntansi pajak tangguhan komprehensif.	0.500	1.000	2.000	2.000
Alokasi pajak antar periode.	0.500	0.500	1.000	2.000

Beban PPh tidak sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan	0.500	0.500	0.500	1.000
Σ	2.500	4.000	5.500	7.000

Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan jumlah total pada kolom yang bersangkutan, akan diperoleh bobot relatif yang dinormalkan. Nilai vektor eigen dihasilkan dari rata-rata nilai bobot relatif untuk tiap baris. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.23. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Aset-Liabilitas yang dinormalkan

	Estimasi pajak aktual tahun mendatang.	Implementasi akuntansi pajak tangguhan komprehensif	Alokasi pajak antar periode.	Beban PPh tidak sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan	Vektor Eigen (yang dinormalkan)
Estimasi pajak aktual tahun mendatang.	0.400	0.500	0.364	0.286	0.387
Implementasi akuntansi pajak tangguhan komprehensif.	0.200	0.250	0.364	0.286	0.275
Alokasi pajak antar periode.	0.200	0.125	0.182	0.286	0.198
Beban PPh tidak sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan	0.200	0.125	0.091	0.143	0.140

Selanjutnya nilai eigen maksimum ($\lambda_{\text{maksimum}}$) didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom dengan vektor eigen. Nilai eigen maksimum yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

$$\lambda_{\text{maksimum}} = (2.500 \times 0.387) + (4.000 \times 0.275) + (5.500 \times 0.198) + (7.000 \times 0.140) = 4.135$$

Karena matriks berordo 4 (yakni terdiri dari 4 alternatif), maka nilai indeks konsistensinya (CI) yang diperoleh adalah:

$$CI = \frac{\lambda_{\text{max}} - n}{n - 1} = \frac{4.135 - 4}{4 - 1} = 0.045$$

Untuk $n = 4$, $RI = 0.9$ (tabel Saaty), maka:

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.045}{0.9} = 0.050 < 0.100$$

Karena $CR < 0,100$ berarti preferensi responden adalah konsisten.

Berikut ini adalah urutan prioritas untuk sub alternatif metode aset-liabilitas:

Tabel 4.24. Urutan Prioritas Sub Alternatif Metode Aset-Liabilitas

Urutan Prioritas	Sub Alternatif	Bobot Evaluasi	Prosesntase
I	Estimasi pajak aktual tahun mendatang.	0.387	38.7%
II	Implementasi akuntansi pajak tangguhan komprehensif.	0.275	27.5%
III	Alokasi pajak antar periode.	0.198	19.8%
IV	Beban PPh tidak sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan	0.140	14.0%

Evaluasi terhadap sub alternatif metode aset-liabilitas menunjukkan bahwa, yang menjadi konsep dasar utama adalah estimasi pajak aktual tahun mendatang, hal ini mengingat orientasi utamanya ada pada penyajian laporan posisi keuangan.

4.1.6.2. Perhitungan Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Tangguhan

Metode ini menganut prinsip kas dan tidak terdapat adanya alokasi perbedaan waktu antara pajak dengan akuntansi ke periode berikutnya, sehingga selisih perhitungan PPh hanya disajikan sebagai pajak tangguhan dalam laporan laba rugi tahun berjalan saja dan beban PPh tidak sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan. Perbandingan berpasangan untuk sub alternatif metode tangguhan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.25. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Tangguhan

	<i>Matching principle</i> (pendapatan dan beban yang terkait diakui pada saat direalisasikan).	Efek perbedaan perhitungan PPh antara komersil dan fiskal hanya pada laporan laba rugi.	Beban PPh tidak sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.
<i>Matching principle</i> (pendapatan dan beban yang terkait diakui pada saat direalisasikan).	1	2	3
Efek perbedaan perhitungan PPh antara komersil dan fiskal hanya pada laporan laba rugi.	$\frac{1}{2}$	1	2
Beban PPh tidak sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	1

Perhitungan matriks untuk sub alternatif metode tangguhan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.26. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Tangguhan yang disederhanakan

	<i>Matching principle</i> (pendapatan dan beban yang terkait diakui pada saat direalisasikan).	Efek perbedaan perhitungan PPh antara komersil dan fiskal hanya pada laporan laba rugi.	Beban PPh tidak sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.
<i>Matching principle</i> (pendapatan dan beban yang terkait diakui pada saat direalisasikan).	1.000	2.000	3.000
Efek perbedaan perhitungan PPh antara komersil dan fiskal hanya pada laporan laba rugi.	0.500	1.000	2.000
Beban PPh tidak sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.	0.333	0.500	1.000
Σ	1.833	3.500	6.000

Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan jumlah total pada kolom yang bersangkutan, akan diperoleh bobot relatif yang dinormalkan. Nilai vektor eigen dihasilkan dari rata-rata nilai bobot relatif untuk tiap baris. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.27. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Tangguhan yang dinormalkan

	<i>Matching principle</i> (pendapatan dan beban yang terkait diakui pada saat direalisasikan).	Efek perbedaan perhitungan PPh antara komersil dan fiskal hanya pada laporan laba rugi.	Beban PPh tidak sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.	Vektor Eigen (yang dinormalkan)
<i>Matching principle</i> (pendapatan dan beban yang terkait diakui pada saat direalisasikan).	0.545	0.571	0.500	0.539
Efek perbedaan perhitungan PPh antara komersil dan fiskal hanya pada laporan laba rugi.	0.273	0.286	0.333	0.297
Beban PPh tidak sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.	0.182	0.143	0.167	0.164

Selanjutnya nilai eigen maksimum ($\lambda_{\text{maksimum}}$) didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom dengan vektor eigen. Nilai eigen maksimum yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

$$\lambda_{\text{maksimum}} = (1.833 \times 0.539) + (3.500 \times 0.297) + (6.000 \times 0.164) = 3.011$$

Karena matriks berordo 3 (yakni terdiri dari 3 alternatif), maka nilai indeks konsistensinya (CI) yang diperoleh adalah:

$$CI = \frac{\lambda_{\text{max}} - n}{n - 1} = \frac{3.011 - 3}{3 - 1} = 0.006$$

Untuk $n = 3$, $RI = 0.58$ (tabel Saaty), maka:

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.006}{0.58} = 0.010 < 0.100$$

Karena $CR < 0,100$ berarti preferensi responden adalah konsisten.

Dari hasil evaluasi diperoleh urutan prioritas untuk sub alternatif metode tangguhan, yaitu:

Tabel 4.28. Urutan Prioritas Sub Alternatif Metode Tangguhan

Urutan Prioritas	Sub Alternatif	Bobot Evaluasi	Prosesntase
I	<i>Matching principle</i> (pendapatan dan beban yang terkait diakui pada saat direalisasikan).	0.539	53.9%
II	Efek perbedaan perhitungan PPh antara komersil dan fiskal hanya pada laporan laba rugi.	0.297	29.7%
III	Beban PPh tidak sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.	0.164	16.4%

Evaluasi terhadap sub alternatif metode tangguhan menunjukkan bahwa, konsep dasar yang menjadi prioritas utama adalah konsep *matching principle* (pendapatan dan beban yang terkait diakui pada saat direalisasikan). hal ini mengacu pada prinsip kas, yaitu jika kas diterima maka kemudian keuntungan diakui, sedangkan jika kas dibayar maka kemudian biaya diakui.

4.1.6.3. Perhitungan Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Bersih dari Pajak

Metode bersih dari pajak mendasarkan diri pada asumsi bahwa aset, liabilitas dan ekuitas disajikan bersih dari efek pajak. Menurut metode ini, tidak ada akun pajak tangguhan yang perlu dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Beban PPh sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan. Perbandingan berpasangan untuk sub alternatif metode tangguhan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.29. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Bersih dari Pajak

	Aset, Liabilitas dan ekuitas disajikan bersih dari efek pajak.	Non alokasi pajak tangguhan.	Beban PPh sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.
Aset, Liabilitas dan ekuitas disajikan bersih dari efek pajak.	1	4	3
Non alokasi pajak tangguhan.	1/4	1	½
Beban PPh sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.	1/3	2	1

Perhitungan matriks untuk sub alternatif metode bersih dari pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.30. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Bersih dari Pajak yang disederhanakan

	Aset, Liabilitas dan ekuitas disajikan bersih dari efek pajak.	Non alokasi pajak tangguhan.	Beban PPh sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.
Aset, Liabilitas dan ekuitas disajikan bersih dari efek pajak.	1.000	4.000	3.000
Non alokasi pajak tangguhan.	0.250	1.000	0.500
Beban PPh sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.	0.333	2.000	1.000
Σ	1.583	7.000	4.500

Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan jumlah total pada kolom yang bersangkutan, akan diperoleh bobot relatif yang dinormalkan. Nilai vektor eigen dihasilkan dari rata-rata nilai bobot relatif untuk tiap baris. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.31. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Bersih dari Pajak yang dinormalkan

	Aset, Liabilitas dan ekuitas disajikan bersih dari efek pajak.	Non alokasi pajak tangguhan.	Beban PPh sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.	Vektor Eigen (yang dinormalkan)
Aset, Liabilitas dan ekuitas disajikan bersih dari efek pajak.	0.632	0.571	0.667	0.623
Non alokasi pajak tangguhan.	0.158	0.143	0.111	0.137
Beban PPh sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.	0.211	0.286	0.222	0.239

Selanjutnya nilai eigen maksimum ($\lambda_{\text{maksimum}}$) didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom dengan vektor eigen. Nilai eigen maksimum yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

$$\lambda_{\text{maksimum}} = (1.583 \times 0.623) + (7.000 \times 0.137) + (4.500 \times 0.239) = 3.025$$

Karena matriks berordo 3 (yakni terdiri dari 3 alternatif), maka nilai indeks konsistensinya (CI) yang diperoleh adalah:

$$CI = \frac{\lambda_{\text{max}} - n}{n - 1} = \frac{3.025 - 3}{3 - 1} = 0.013$$

Untuk $n = 3$, $RI = 0.58$ (tabel Saaty), maka:

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.013}{0.58} = 0.022 < 0.100$$

Karena $CR < 0,100$ berarti preferensi responden adalah konsisten.

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh urutan prioritas untuk sub alternatif metode bersih dari pajak, yaitu:

Tabel 4.32. Urutan Prioritas Sub Alternatif Metode Bersih dari Pajak

Urutan Prioritas	Sub Alternatif	Bobot Evaluasi	Prosesntase
I	Aset, Liabilitas dan ekuitas disajikan bersih dari efek pajak.	0.623	62.3%
II	Beban PPh sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.	0.239	23.9%
III	Beban PPh sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.	0.137	13.7%

Menurut metode bersih dari pajak, tidak ada akun pajak tangguhan yang perlu dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Beban PPh dilaporkan dalam laporan laba rugi sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan. Sehingga konsep aset, liabilitas dan ekuitas disajikan bersih dari efek pajak menjadi prioritas utama.

4.1.6.4. Perhitungan Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Alokasi Parsial

Metode alokasi parsial berbasis akuntansi akrual, hanya mengakui alokasi untuk perbedaan waktu yang terjadi pada periode berjalan ke periode yang bersangkutan. Pendapatan dan beban diakui sebesar pengakuan transaksi dan Beban PPh tidak sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.

Perbandingan berpasangan untuk sub alternatif metode alokasi parsial adalah sebagai berikut:

Tabel 4.33. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Alokasi Parsial

	PPh ditangguhkan hanya meliputi perbedaan waktu periode berjalan.	Pendapatan dan beban diakui sebesar pengakuan transaksi.	Beban PPh tidak sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.
PPh ditangguhkan hanya meliputi perbedaan waktu periode berjalan.	1	2	2
Pendapatan dan beban diakui sebesar pengakuan transaksi.	$\frac{1}{2}$	1	2
Beban PPh tidak sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1

Perhitungan matriks untuk sub alternatif metode alokasi parsial adalah sebagai berikut:

Tabel 4.34. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Alokasi Parsial yang disederhanakan

	PPh ditangguhkan hanya meliputi perbedaan waktu periode berjalan.	Pendapatan dan beban diakui sebesar pengakuan transaksi.	Beban PPh tidak sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.
PPh ditangguhkan hanya meliputi perbedaan waktu periode berjalan.	1.000	2.000	2.000
Pendapatan dan beban diakui sebesar pengakuan transaksi.	0.500	1.000	2.000

Beban PPh tidak sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.	0.500	0.500	1.000
Σ	2.000	3.500	5.000

Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan jumlah total pada kolom yang bersangkutan, akan diperoleh bobot relatif yang dinormalkan. Nilai vektor eigen dihasilkan dari rata-rata nilai bobot relatif untuk tiap baris. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.35. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Alokasi Parsial yang dinormalkan

	PPh ditangguhkan hanya meliputi perbedaan waktu periode berjalan.	Pendapatan dan beban diakui sebesar pengakuan transaksi.	Beban PPh tidak sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.	Vektor Eigen (yang dinormalkan)
PPh ditangguhkan hanya meliputi perbedaan waktu periode berjalan.	0.500	0.571	0.400	0.490
Non alokasi pajak tangguhan.	0.250	0.286	0.400	0.312
Beban PPh sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.	0.250	0.143	0.200	0.198

Selanjutnya nilai eigen maksimum ($\lambda_{\text{maksimum}}$) didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom dengan vektor eigen. Nilai eigen maksimum yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

$$\lambda_{\text{maksimum}} = (2.000 \times 0.490) + (3.500 \times 0.312) + (5.000 \times 0.198) = 3.061$$

Karena matriks berordo 3 (yakni terdiri dari 3 alternatif), maka nilai indeks konsistensinya (CI) yang diperoleh adalah:

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} = \frac{3.061 - 3}{3 - 1} = 0.030$$

Untuk $n = 3$, $RI = 0.58$ (tabel Saaty), maka:

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.030}{0.58} = 0.052 < 0.100$$

Karena $CR < 0,100$ berarti preferensi responden adalah konsisten.

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh urutan prioritas untuk sub alternatif metode alokasi parsial, yaitu:

Tabel 4.36. Urutan Prioritas Sub Alternatif Metode Alokasi Parsial

Urutan Prioritas	Sub Alternatif	Bobot Evaluasi	Prosesntase
I	PPh ditangguhkan hanya meliputi perbedaan waktu periode berjalan.	0.490	49.0%
II	Non alokasi pajak tangguhan.	0.312	31.2%
III	Beban PPh sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.	0.198	19.8%

Prioritas utama dari pendekatan ini adalah PPh ditangguhkan hanya meliputi perbedaan waktu periode berjalan, sehingga tidak semua akumulasi perbedaan antara perhitungan PPh menurut akuntansi dan pajak harus dibebankan ke periode berjalan. PPh Ditangguhkan dalam laporan posisi keuangan hanya dibentuk untuk menampung selisih perhitungan PPh pada tahun berjalan saja.

4.1.6.5. Perhitungan Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Alokasi Intra Periode

Menurut konsep metode alokasi intra periode, keuntungan dan kerugian luar biasa harus dilaporkan secara terpisah dalam laporan laba rugi. Semua konsekuensi pajak yang timbul dialokasikan langsung pada transaksi yang bersangkutan. Beban PPh sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan. Perbandingan berpasangan untuk sub alternatif metode alokasi intra periode adalah sebagai berikut:

Tabel 4.37. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Alokasi Intra Periode

	Pelaporan laba bersih operasi dilakukan sebelum pos-pos luar biasa.	Semua konsekuensi pajak yang timbul dialokasikan langsung pada transaksi yang bersangkutan.	Beban PPh sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.
Pelaporan laba bersih operasi dilakukan sebelum pos-pos luar biasa.	1	3	4
Semua konsekuensi pajak yang timbul dialokasikan langsung pada transaksi yang bersangkutan.	1/3	1	2
Beban PPh sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.	¼	½	1

Perhitungan matriks untuk sub alternatif metode alokasi intra periode adalah sebagai berikut:

Tabel 4.38. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Alokasi Intra Periode yang disederhanakan

	Pelaporan laba bersih operasi dilakukan sebelum pos-pos luar biasa.	Semua konsekuensi pajak yang timbul dialokasikan langsung pada transaksi yang bersangkutan.	Beban PPh sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.
Pelaporan laba bersih operasi dilakukan sebelum pos-pos luar biasa.	1.000	3.000	4.000
Semua konsekuensi pajak yang timbul dialokasikan langsung pada transaksi yang bersangkutan.	0.333	1.000	2.000
Beban PPh sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.	0.250	0.500	1.000
Σ	1.583	4.500	7.000

Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan jumlah total pada kolom yang bersangkutan, akan diperoleh bobot relatif yang dinormalkan. Nilai vektor eigen dihasilkan dari rata-rata nilai bobot relatif untuk tiap baris. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.39. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Alokasi Intra
Periode yang dinormalkan

	Pelaporan laba bersih operasi dilakukan sebelum pos-pos luar biasa.	Semua konsekuensi pajak yang timbul dialokasikan langsung pada transaksi yang bersangkutan.	Beban PPh sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.	Vektor Eigen (yang dinormalkan)
Pelaporan laba bersih operasi dilakukan sebelum pos-pos luar biasa.	0.632	0.667	0.571	0.623
Semua konsekuensi pajak yang timbul dialokasikan langsung pada transaksi yang bersangkutan.	0.211	0.222	0.286	0.239
Beban PPh sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.	0.158	0.111	0.143	0.137

Selanjutnya nilai eigen maksimum ($\lambda_{\text{maksimum}}$) didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom dengan vektor eigen. Nilai eigen maksimum yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

$$\lambda_{\text{maksimum}} = (4.000 \times 0.623) + (2.000 \times 0.239) + (1.000 \times 0.137) = 3.025$$

Karena matriks berordo 3 (yakni terdiri dari 3 alternatif), maka nilai indeks konsistensinya (CI) yang diperoleh adalah:

$$CI = \frac{\lambda_{\text{max}} - n}{n - 1} = \frac{3.025 - 3}{3 - 1} = 0.013$$

Untuk $n = 3$, $RI = 0.58$ (tabel Saaty), maka:

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.013}{0.58} = 0.022 < 0.100$$

Karena $CR < 0,100$ berarti preferensi responden adalah konsisten.

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh urutan prioritas untuk sub alternatif metode alokasi intra periode, yaitu:

Tabel 4.40. Urutan Prioritas Sub Alternatif Metode Alokasi Intra Periode

Urutan Prioritas	Sub Alternatif	Bobot Evaluasi	Prosesntase
I	Pelaporan laba bersih operasi dilakukan sebelum pos-pos luar biasa.	0.623	62.3%
II	Semua konsekuensi pajak yang timbul dialokasikan langsung pada transaksi yang bersangkutan.	0.239	23.9%
III	Beban PPh sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.	0.137	13.7%

Konsep pelaporan laba bersih operasi dilakukan sebelum pos-pos luar biasa menjadi prioritas utama, sebab nilai PPh (maupun manfaatnya) dapat dialokasikan ke operasi berkelanjutan, pemberhentian operasi (*discontinued operation*), pos luar biasa, efek kumulatif perubahan akuntansi, dan penyesuaian terhadap periode sebelumnya. Jika hanya terdapat satu pos di luar operasi berkelanjutan, maka porsi sisa setelah alokasi kemudian dialokasikan ke pos tersebut. Laba bersih operasi sebelum komponen luar biasa tidak akan bercampur dengan pencatatan keuntungan (bersih dari pajak) yang dilaporkan secara terpisah.

4.1.6.6. Perhitungan Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Non Alokasi

Alur pendekatan metode non alokasi adalah pengakuan PPh ditangguhkan itu tidak dapat memberikan informasi berguna atau setidaknya mampu menghemat biaya. Pembayaran PPh, tergantung pada nilai laba kena pajak di masa depan. Jika penghasilan kena pajak tidak terjadi di masa depan maka tidak akan timbul liabilitas, dan aset pajak ditangguhkan pun juga tidak akan diakui. Beban PPh sama seperti beban pada umumnya, tidak ada perbedaan pengakuan komersil dan fiskal. Perbandingan berpasangan untuk sub alternatif metode non alokasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.41. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Non Alokasi

	Non alokasi PPh ditangguhkan, karena tidak mengandung kegunaan informasi.	Liaibilitas PPh dan aset pajak tangguhan bergantung pada realisasi penghasilan kena pajak pada tahun mendatang.	Beban PPh sama seperti beban pada umumnya, tidak ada perbedaan pengakuan komersil dan fiskal.
Non alokasi PPh ditangguhkan, karena tidak mengandung kegunaan informasi.	1	1/2	3
Liaibilitas PPh dan aset pajak tangguhan bergantung pada realisasi penghasilan kena pajak pada tahun mendatang.	2	1	3

Beban PPh sama seperti beban pada umumnya, tidak ada perbedaan pengakuan komersil dan fiskal.	1/3	1/3	1
---	-----	-----	---

Perhitungan matriks untuk sub alternatif metode non alokasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.42. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Non Alokasi yang disederhanakan

	Non alokasi PPh ditangguhkan, karena tidak mengandung kegunaan informasi.	Liaibilitas PPh dan aset pajak tangguhan bergantung pada realisasi penghasilan kena pajak pada tahun mendatang.	Beban PPh sama seperti beban pada umumnya, tidak ada perbedaan pengakuan komersil dan fiskal.
Non alokasi PPh ditangguhkan, karena tidak mengandung kegunaan informasi.	1.000	0.500	3.000
Liaibilitas PPh dan aset pajak tangguhan bergantung pada realisasi penghasilan kena pajak pada tahun mendatang.	2.000	1.000	3.000
Beban PPh sama seperti beban pada umumnya, tidak ada perbedaan pengakuan komersil dan fiskal.	0.333	0.333	1.000
Σ	3.333	1.833	7.000

Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan jumlah total pada kolom yang bersangkutan, akan diperoleh bobot relatif yang dinormalkan. Nilai vektor eigen dihasilkan dari rata-rata nilai bobot relatif untuk tiap baris. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.43. Matriks Faktor Evaluasi untuk Sub Alternatif Metode Non Alokasi yang dinormalkan

	Non alokasi PPh ditanggihkan, karena tidak mengandung kegunaan informasi.	Liaibilitas PPh dan aset pajak tanggihan bergantung pada realisasi penghasilan kena pajak pada tahun mendatang.	Beban PPh sama seperti beban pada umumnya, tidak ada perbedaan pengakuan komersil dan fiskal.	Vektor Eigen (yang dinormalkan)
Non alokasi PPh ditanggihkan, karena tidak mengandung kegunaan informasi.	0.300	0.273	0.429	0.334
Liaibilitas PPh dan aset pajak tanggihan bergantung pada realisasi penghasilan kena pajak pada tahun mendatang.	0.600	0.545	0.429	0.525
Beban PPh sama seperti beban pada umumnya, tidak ada perbedaan pengakuan komersil dan fiskal.	0.100	0.182	0.143	0.142

Selanjutnya nilai eigen maksimum ($\lambda_{\text{maksimum}}$) didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom dengan vektor eigen. Nilai eigen maksimum yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

$$\lambda_{\text{maksimum}} = (3.333 \times 0.334) + (1.833 \times 0.525) + (7.000 \times 0.142) = 3.065$$

Karena matriks berordo 3 (yakni terdiri dari 3 alternatif), maka nilai indeks konsistensinya (CI) yang diperoleh adalah:

$$CI = \frac{\lambda_{\text{max}} - n}{n - 1} = \frac{3.065 - 3}{3 - 1} = 0.033$$

Untuk $n = 3$, $RI = 0.58$ (tabel Saaty), maka:

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.033}{0.58} = 0.056 < 0.100$$

Karena $CR < 0,100$ berarti preferensi responden adalah konsisten.

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh urutan prioritas untuk sub alternatif metode non alokasi, yaitu:

Tabel 4.44. Urutan Prioritas Sub Alternatif Metode Non Alokasi

Urutan Prioritas	Sub Alternatif	Bobot Evaluasi	Prosesntase
I	Liaibilitas PPh dan aset pajak tangguhan bergantung pada realisasi penghasilan kena pajak pada tahun mendatang.	0.525	52.5%
II	Non alokasi PPh ditanggihkan, karena tidak mengandung kegunaan informasi.	0.334	33.4%
III	Beban PPh sama seperti beban pada umumnya, tidak ada perbedaan pengakuan komersil dan fiskal.	0.142	14.2%

Prioritas utama dari pendekatan metode non alokasi adalah konsep laibilitas PPh dan aset pajak tangguhan bergantung pada realisasi penghasilan kena pajak pada tahun mendatang. Pembayaran pajak tambahan di masa depan adalah bersyarat, yaitu tergantung pada nilai laba kena pajak di masa depan. Jika penghasilan kena pajak tidak terjadi di masa depan maka tidak akan timbul laibilitas.

4.2. Pemilihan Metode Pembebanan Pajak Penghasilan (PPh) Untuk Mengoptimalkan Kegunaan Laporan Keuangan

Analisis terhadap pemilihan metode pembebanan PPh menimbulkan konsekuensi berbeda-beda dalam penyajian laporan keuangan. Metode non alokasi melaporkan beban PPh menurut perhitungan pembukuan pajak, sedangkan metode aset-laibilitas dan metode tangguhan mengakomodir selisih perbedaan antara pembukuan menurut pajak dan akuntansi menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sehingga terdapat komponen perbedaan waktu dan perbedaan tetap.

Metode bersih dari pajak mengharuskan pelaporan komponen-komponen dalam laporan keuangan bebas dari konsekuensi pajak, sedangkan metode alokasi parsial membebankan selisih perhitungan PPh antara pembukuan menurut pajak dan SAK hanya atas periode berjalan, tanpa konsekuensi atas selisih yang sama dari periode sebelumnya. Metode alokasi komprehensif intra periode tidak mengijinkan pembebanan PPh antar periode, sehingga semua konsekuensinya hanya mempengaruhi kinerja laporan keuangan pada periode berjalan.

Hal yang perlu diperhatikan apabila metode aset-liabilitas diterapkan pada penyajian laporan keuangan adalah selama beroperasi dan aset tetap serta omzet

bertambah, perbedaan pengakuan yang menimbulkan pajak penghasilan ditangguhkan akan bertambah terus-menerus. Karena kewajiban pajak penghasilan yang ditangguhkan secara total tidak akan pernah dilunasi, maka pilihan metode alokasi parsial menjadi pilihan berikutnya yang diperlukan karena perbedaan waktu tidak terakumulasi secara berulang-ulang.

Menurut prinsip alokasi, pengakuan beban itu mengacu pada penggunaan aset yang memberikan manfaat pada beberapa periode, sebagai contoh adalah depresiasi dan amortisasi. Penggunaan metode tangguhan dalam akuntansi PPh adalah tidak adanya alokasi perbedaan waktu antara pajak dengan akuntansi ke periode berikutnya, sehingga selisih perhitungan PPh hanya disajikan sebagai pajak tangguhan dalam laporan laba rugi tahun berjalan saja.

Hasil analisis perbandingan metode-metode pembebanan PPh dan efeknya terhadap penyajian laporan keuangan, menunjukkan perbedaan waktu dapat menimbulkan kenaikan pajak penghasilan yang ditangguhkan. Perbedaan pengakuan antara akuntansi komersil dan fiskal, menimbulkan perbedaan yang terjadi secara berulang-ulang dan harus dilakukan koreksi pada saat penyusunan dan pelaporan pajak. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang Akuntansi PPh bertujuan mengakomodir perbedaan waktu pengakuan penghasilan, biaya, dan beban dalam pengungkapan laporan keuangan akuntansi (atau komersil) dengan pendekatan aset-laibilitas

Untuk mengoptimalkan kegunaan laporan keuangan perlu dilakukan telaah terhadap metode pembebanan PPh yang menjadi prioritas utama (metode aset-liabilitas), sehingga kesesuaiannya dengan tujuan entitas dapat dicapai. Bila entitas

menerapkan metode aset-liabilitas maka hal-hal yang perlu diperhatikan terhadap pengungkapan dan pelaporan keuangan meliputi:

1. Pembebanan ke belakang (*backward*) aset pajak tangguhan dan pembebanan ke depan (*forward*) terhadap laibilitas pajak ditangguhkan.
2. Pengakuan aset pajak tangguhan jika realisasi dipandang lebih mungkin terjadi daripada tidak (*more likely than not*).
3. Perlakuan konsisten terhadap aset maupun laibilitas pajak ditangguhkan.
4. Penentuan sifat lancar atau tidak lancar diturunkan menurut klasifikasi atas aset atau laibilitas yang terkait.
5. Rugi pajak ke depan dicatat dengan cara penilaian yang sama dengan cadangan penilaian aset pajak ditangguhkan.
6. PPh selalu dibayar penuh pada periode terjadinya. Bagaimanapun, operasi bisnis diharapkan terjadi secara berkelanjutan, sehingga beban PPh terus terjadi di masa depan.

Metode non alokasi dapat menjadi alternatif untuk pembebanan PPh oleh perusahaan yang tidak *go-public* di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang mewajibkan pengungkapan sebagaimana di dalam PSAK No. 46 dengan pendekatan aset-liabilitas. Menurut analisis kami, konsep utama dari metode non alokasi sejalan dengan PSAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP).

Pada SAK ETAP dinyatakan bahwa pajak terutang harus diakui atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika pembayarannya melebihi yang tercatatnya, maka kelebihan tersebut diakui sebagai aset. Dalam SAK ETAP tidak menyebutkan adanya pengaruh atau efek dari perbedaan temporer antara komersial dengan fiskal yang menyebabkan

adanya aset/kewajiban pajak tangguhan. Oleh karena itu, pada penerapan PSAK ETAP per 1 Januari 2011, suatu entitas tidak lagi diperkenankan mengakui adanya aset/ kewajiban pajak tangguhan.

Jika entitas merubah kebijakan akuntansi pajak tangguhan dari PSAK No. 46 ke PSAK ETAP, dapat merujuk pada PSAK 25 tentang Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, kesalahan mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi. PSAK 25 paragraf 42 menyatakan bahwa, suatu perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan sehubungan dengan penerapan suatu standar akuntansi keuangan yang diberlakukan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan masa transisi yang ditentukan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan tersebut. Jika tidak ada ketentuan masa transisi dan untuk semua perubahan kebijakan akuntansi yang lain, perubahan kebijakan akuntansi tersebut harus diterapkan sesuai dengan perlakuan akuntansi dalam paragraf 45, 48 dan 49 dari PSAK 25.

Pada paragraf 44 PSAK 25 dinyatakan bahwa, Jika suatu perusahaan belum menerapkan suatu standar akuntansi keuangan baru yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tapi masih belum berlaku resmi, perusahaan dianjurkan untuk mengungkapkan hakekat dari perubahan kebijakan akuntansi tersebut di masa yang akan datang dan melakukan estimasi atas pengaruh perubahan tersebut pada laba atau rugi bersih dan posisi keuangan perusahaan tersebut.

Pada uraian di atas dinyatakan bahwa adanya masa transisi yang akan menentukan apakah suatu perubahan, termasuk perubahan kebijakan pajak tangguhan, berlaku prospektif atau retrospektif. PSAK ETAP sudah efektif berlaku 1 Januari 2010, maka entitas harus tunduk pada Paragraf 45 PSAK 25. Ketentuan akuntansi dalam paragraf ini menyatakan: “Kebijakan akuntansi harus

diterapkan secara retrospektif dengan melaporkan jumlah setiap penyesuaian yang terjadi yang berhubungan dengan periode sebelumnya sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode (*retained earnings*), kecuali jika jumlah tersebut tidak dapat ditentukan secara wajar. Informasi komparatif harus dinyatakan kembali, kecuali jika untuk melaksanakannya dianggap tidak praktis“. Sehubungan dengan pernyataan paragraf 45 ini, maka aset/kewajiban pajak tangguhan harus dihapuskan, serta dilakukan penyajian kembali laporan keuangan entitas tahun sebelumnya, dengan menyajikan angka komparatif yang disesuaikan, baik aset/kewajiban pajak tangguhan maupun pendapatan/biaya pajak tangguhan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas kriteria dan faktor-faktor dalam memilih metode pembebanan pajak penghasilan (PPh) yang tepat untuk mengoptimalkan kegunaan laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Vektor prioritas menunjukkan bahwa kriteria *Income statement approach* memiliki preferensi multiplikatif prioritas lebih dominan dari *balancesheet approach* dalam pemilihan metode pembebanan PPh. Dari hasil perhitungan faktor pembobotan hirarki untuk semua kriteria pada tabel di atas menunjukkan bahwa, kriteria *Income Statement Approach* merupakan kriteria prioritas untuk pembebanan pajak penghasilan, dengan bobot 0,875 atau 87,5% dibandingkan dengan kriteria *Balancesheet Approach* dengan nilai bobot 0,125 atau 12,5%.
2. Hubungan antara kriteria dengan faktor-faktor menghasilkan prioritas metode pembebanan PPh. Prioritas utama adalah metode aset-liabilitas dengan nilai bobot evaluasi sebesar 0,234 atau 23,4%, kemudian metode tangguhan menjadi prioritas kedua dengan nilai bobot 0,217 atau 21,7%, dan metode bersih dari pajak menjadi prioritas ketiga dengan nilai bobot 0,182 atau 18,2%, sedangkan metode alokasi parsial, metode alokasi intra periode dan metode non alokasi menjadi prioritas keempat, kelima dan keenam dengan nilai bobot masing-

masing sebesar 0,171 atau 17,1%, kemudian 0,108 atau 10,8% dan 0,087 atau 8,70%.

3. Untuk mengoptimalkan daya guna laporan keuangan, penyesuaian antara metode pembebanan PPh yang menjadi prioritas dengan tujuan dan ruang lingkup kegiatan entitas merupakan langkah sistematis untuk mendapatkan pilihan yang ideal, karena setiap metode pembebanan PPh menimbulkan konsekuensi berbeda-beda dalam laporan keuangan. Secara umum tidak terdapat metode pembebanan PPh yang bertentangan dengan ketentuan umum perpajakan di Indonesia, sehingga berpotensi mendapatkan peluang yang sama untuk dikembangkan, namun saat ini hanya metode alokasi komprehensif aset-liabilitas dan metode non alokasi yang dikembangkan di Indonesia, masing-masing metode tersebut dibakukan dalam PSAK No. 46 dan PSAK ETAP.

5.2. Saran

Penelitian berikutnya perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memperpanjang periode penelitian dan menambah jumlah dan ragam latar belakang responden ahli di bidang perpajakan dan akuntansi dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga mendapatkan preferensi multiplikatif yang lebih terstruktur, massif dan sistematis.
2. Untuk mengembangkan penelitian, perlu dipadukan dengan metode pengambilan keputusan lainnya yang lebih komprehensif dan mengolah data dengan program ekspert, agar hasilnya cepat dan akurat.

3. Disarankan bagi regulator pajak untuk mempertimbangkan azas keadilan dalam memutuskan sengketa pajak dan mereformasi peraturan perpajakan, dengan mempertimbangan konsekuensi ekonomi dari daya guna laporan keuangan sebagai akibat pengungkapan konsekuensi penerapan beberapa metode pajak penghasilan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Kamran, and John Goodwin. 2007. *An empirical investigation of earnings restatements by Australian firms*. Accounting & Finance 47.1 (2007): 1-22. John Wiley & Sons, Inc.
- Allen Joyce S. and Surdick John J. 2001. *Graphical Transaction Model for Deferred Tax Analysis and Accounting*. The CPA Journal-Issue August 2001-2001. nyscpa.org.
- Ayers, Benjamin C. 1998. *Deferred Tax Accounting Under SFAS No. 109 : An Empirical Investigation of Its Incremental Value Relevance Relatife to APB No. 11*. The Accounting Review Vol. 73 No.2 April. University of Georgia.
- Behn, Bruce K., Tima V.Eaton, and Jan R.Williams. 1998. *The Determinant of the Defferred Tax Allowance Account Under SFAS 109*. Accounting Horizons Vol 12 No. 1 March. faculty.etsu.edu.
- Brioschi, F., Giudici, G. and Paleari, S. 2000. *Estimating Deferred Taxation on Dividends in Business Groups*. MDE.
- Brickner Daniel R. 2003. *An Analysis of Factors Impacting the Value-Relevance of SFAS No. 107 Fair Value Disclosures*. Journal of Business and Economics Research April, 2003: 17-32. Eastern Michigan University.
- Chambers, Raymond J. 1970. *Second Thoughts on Continuously Contemporary Accounting I*. Abacus.
- Chaney, Paul K and Debra C Jeter. 1994. *The Effect of Deferred Taxes on Security Prices*. Journal of Accounting, Auditing and Finance, Vo1.9. Winter.
- Chavis, Betty. 1992. *Voluntary disclosure of private, non- proprietary information by selected oil and gas firms: an empirical test of analytical principal/agent models*. Oil and Gas Tax Quarterly Vol 41, No. 1.
- Chrispin, Elizabeth. 2002. *Financial Reporting: Deferred Tax-Full Of Surprises*. Proquest ABI/INFORM.
- Christensen, John, and Richard Murphy. 2004. *The social irresponsibility of corporate tax avoidance: Taking CSR to the bottom line*. Palgrave Macmillan Development Vol.47.3.
- Chan, Kam C., and Gim S. Seow. 1996. *The association between stock returns and foreign GAAP earnings versus earnings adjusted to US GAAP*. Journal of Accounting and Economics 21.1.
- Colley, Robert. 2005. *The Shoreditch tax frauds: a study of the relationship between the state and civil society in 1860*. Historical Research 78.202 (2005): 540-562. John Wiley & Sons, Inc.

- Cooper, Donald R., Pamela S. Schindler, and Jianmin Sun. 2006. *Business research methods*.
- Dunbar, Amy E. 2004. *Genesis of an online course*. Issues in Accounting Education 19.3. American Accounting Association.
- Foo, Yin Fah. 2008. *A cross-cultural study of accounting concepts applied in international financial reporting standards*. Diss. Victoria University.
- Gleason Cristi A. dan Mills Lillian F. 2002. *Materiality and Contingent Tax Liability Reporting*. The Accounting Review, vol 77, 2002, 317-342. The University of IOWA.
- Givoly Dan and Hayn Carla. 2002. *Rising Conservatism: Implications for Financial Analysis*. Financial Analysts Journal Vol. 58, No. 1 (Jan. - Feb., 2002), pp. 56-74. CFA Institute.
- Hall, David J. The Water Multinationals. 2002. *Financial and Other Problems*. Public Services International Research Unit (PSIRU).
- Hendricksen, Eldon S., and Michael F. Van Breda. 1992. *Accounting Theory*. Homewood IL: Richard D. Irwin." (1992). Pennsylvania State University.
- Holland, Kevin, and Richard HG Jackson. 2004. *Earnings Management and Deferred Tax*. Accounting and Business Research 34.2 (2004): 101-123. Routledge.
- Hunt, M. F., Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. 2003. *Intermediate Accounting*. Chapters 15-24, Self-Study Problems/Solutions Book (Vol. 2). Wiley.
- Indonesia, Ikatan Akuntan. 2002. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Kiswara, Endang. 2009. *Buku Ajar Akuntansi Perpajakan*. Universitas Diponegoro.
- Kochin, Levis A., and Richard W. Parks. "Was the Tax-Exempt Bond Market Inefficient or Were Future Expected Tax Rates Negative?." *The Journal of Finance* 43.4 (1988): 913-931.
- Lynn, Stephen Gregory, Chandra Seethamraju, and Ananth Seetharaman. 2008. *Incremental value relevance of unrecognized deferred taxes: evidence from the United Kingdom*. Journal of the American Taxation Association Vol.30.2 (2008): 107-130. aaajournals.org
- Landry, Suzanne. 1998. *Evidence on the value-relevance of deferred tax assets and deferred tax liabilities*. PhD Thesis. University of Florida.
- Lu, Zhou. 2000. *The valuation allowance for deferred tax assets and earnings management*. PhD Thesis. University of Southern California.

- Mills, Lillian F., and Kaye J. Newberry. 2001. *The influence of tax and nontax costs on book-tax reporting differences: Public and private firms*. Journal of the American Taxation Association 23.1 (2001): 1-19.
- Phillips, John D., et al. 2004. *Decomposing changes in deferred tax assets and liabilities to isolate earnings management activities*. Journal of the American Taxation Association.
- Phillips, John, Morton Pincus, and Sonja Olhoffs Rego. 2003. *Earnings management: New evidence based on deferred tax expense*. The Accounting Review 78.2 (2003): 491-521. aaajournals.org
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang Nomor 36. Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- , 2007. *Undang-undang Nomor 28. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Rayburn, Frank R. 1987. *Discounting of deferred income taxes: an argument for reconsideration*. Accounting Horizons 1.1 (1987): 43-49.
- Saaty, Thomas L. 2000. *Fundamentals of decision making and priority theory with the analytic hierarchy process*. Vol. 6. Rws Publications.
- Schrand, Catherine M., and M. H. Wong. 2003. "Earnings management using the valuation allowance for deferred tax assets under SFAS No. 109." Contemporary Accounting Research Volume 20, Issue 3. Canadian Academic Accounting Association.
- Shackelford, Douglas A., and Terry Shevlin. 2001. *Empirical tax research in accounting*. Journal of Accounting and Economics.
- Sidhu, Baljit K., and Greg Whittred. 2003. *The role of political costs in the deferred tax policy choice*. Australian Journal of Management 28.1 (2003): 63-82.
- Staubus, George J. 2004. *Two views of accounting measurement*. Abacus 40.3 (2004): 265-279.
- Weygandt, Kieso, Donald E. Kieso, and D. Paul. 2003. *Financial Accounting*. Kimmel.
- Wolk, Bruce. 1987. *New Exercise and Estate Taxes on Excess Retirement Plan Distributions and Accumulations*. The " U. Fla. L. Rev. 39 (1987): 987.
- Zeff, Stephen A. 2003. *How the US accounting profession got where it is today: Part I*. Accounting Horizons 17.3 (2003): 189-205.
- 1978. *The rise of" economic consequences*. Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University.



Kepada

Bapak/Ibu yang saya hormati

di_Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka penelitian untuk penyusunan tugas akhir/tesis pada Program Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bersama ini Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dalam penelitian yang sedang Saya lakukan, dengan tema **“ANALISIS MODEL PEMILIHAN METODE PEMBEBANAN PAJAK PENGHASILAN”**.

Kuesioner ini bertujuan untuk melakukan pembobotan kriteria dan sub-kriteria pada faktor-faktor yang penting dalam pemilihan metode pembebanan pajak penghasilan. Pembobotan ini bertujuan untuk menentukan tingkat kepentingan kriteria dan sub-kriteria yang sudah ditentukan dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Untuk kelancaran dan kesuksesan penelitian ini, Saya mengharapkan partisipasi dan kesediaan dari Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner berikut ini. Bantuan Bapak/Ibu akan membantu menggambarkan tingkat kepentingan dalam pemilihan metode pembebanan pajak penghasilan. Penelitian ini hanya untuk tujuan akademis, yaitu pengembangan dalam keilmuan akuntansi dan perpajakan, sehingga jawaban yang tepat sangat kami harapkan.

Atas bantuan dan partisipasinya, Saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Slamet Wahyudi

KUESIONER PENELITIAN

<p>SURVEI PEMILIHAN METODE PEMBEBANAN PAJAK PENGHASILAN BADAN</p> <p>Oleh: Slamet Wahyudi Mahasiswa Program Magister Akuntansi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta</p>	<p>RAHASIA</p>
--	-----------------------

IDENTITAS RESPONDEN / <i>EXPERT</i>
<p>Nama :</p> <p>Pendidikan :</p> <p>Pekerjaan :</p> <p>Institusi :</p> <p>Alamat :</p>

<p>Petunjuk Pengisian: Berilah tanda ceklist (√) pada kolom skala kriteria (A) atau kolom skala kriteria (B) yang sesuai dengan pendapat anda. Defenisi Kode: 1: kedua kriteria sama penting (<i>equal importance</i>) 3: kriteria (A) sedikit lebih penting (<i>moderate importance</i>) dibanding dengan (B) 5: kriteria (A) lebih penting (<i>strong importance</i>) dibanding dengan (B) 7: kriteria (A) sangat lebih penting (<i>very strong importance</i>) dibanding dengan (B) 9: kriteria (A) mutlak lebih penting (<i>extreme importance</i>) dibanding dengan (B) Dan jika ragu-ragu antara 2 skala maka ambil nilai tengahnya, misalkan anda ragu-ragu antara 3 dan 5 maka pilih skala 4 dan seterusnya.</p> <p>Sebagai ilustrasi, disajikan perbandingan metode-metode pembebanan PPh pada bagian akhir kuesioner.</p>

Contoh:

Dalam memilih metode pencatatan akuntansi, seberapa pentingkah:

No	Kriteria (A)	Skala									Skala									Kriteria (B)
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Basis Akrua			√																Basis Kas

Jika anda memberi tanda (√) pada skala 7 di kolom A, maka artinya adalah kriteria A dalam contoh ini basis akrua sangat lebih penting dibanding dengan kriteria B dalam contoh ini basis

kas. Akan tetapi jika anda merasa kriteria B (basis kas) sangat lebih penting dibanding dengan kriteria A (basis akrual) maka pengisian kolomnya adalah sebagai berikut:

No	Kriteria (A)	Skala										Skala									Kriteria (B)
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Basis Akrual														√				Basis Kas		

1. Dalam memilih metode pembebanan pajak penghasilan badan, seberapa pentingkah:

No	Kriteria (A)	Skala										Skala									Kriteria (B)
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	<i>Balancesheet approach</i>																		<i>Income statement approach</i>		

2. Dalam hal efek terhadap penyajian Laporan Posisi Keuangan (*balancesheet approach*), seberapa baikkah metode pembebanan pajak penghasilan badan berikut ini:

No	Kriteria (A)	Skala										Skala									Kriteria (B)
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Aset-Liabilitas																		Tanggung		
2	Aset-Liabilitas																		Bersih dari Pajak		
3	Aset-Liabilitas																		Alokasi Parsial		
4	Aset-Liabilitas																		Alokasi Intra Periode		
5	Aset-Liabilitas																		Non Alokasi		

No	Kriteria (A)	Skala										Skala									Kriteria (B)
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Tanggung																		Bersih dari Pajak		
2	Tanggung																		Alokasi Parsial		
3	Tanggung																		Alokasi Intra Periode		
4	Tanggung																		Non Alokasi		

No	Kriteria (A)	Skala										Skala									Kriteria (B)
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Bersih dari Pajak																		Alokasi Parsial		
2	Bersih dari Pajak																		Alokasi Intra Periode		
3	Bersih dari Pajak																		Non Alokasi		

4. Dalam pembebanan pajak penghasilan dengan metode aset-liabilitas, seberapa pentingkah hal-hal berikut ini:

No	Kriteria (A)	Skala									Skala									Kriteria (B)
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Estimasi pajak aktual tahun mendatang.																		Implementasi Akuntansi pajak tanggungan komprehensif.	
2	Estimasi pajak aktual tahun mendatang.																		Alokasi pajak antar periode.	
3	Estimasi pajak aktual tahun mendatang.																		Beban PPh tidak sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.	

No	Kriteria (A)	Skala									Skala									Kriteria (B)
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Implementasi Akuntansi pajak tanggungan komprehensif.																		Alokasi pajak antar periode.	
2	Implementasi Akuntansi pajak tanggungan komprehensif.																		Beban PPh tidak sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.	

No	Kriteria (A)	Skala									Skala									Kriteria (B)
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Alokasi pajak antar periode																		Beban PPh tidak sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan	

5. Dalam pembebanan pajak penghasilan dengan metode tangguhan, seberapa pentingkah hal-hal berikut ini:

No	Kriteria (A)	Skala									Skala									Kriteria (B)
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	<i>Matching principle</i> (pendapatan dan beban yang terkait diakui pada saat direalisasikan).																			Efek perbedaan perhitungan PPh antara komersil dan fiskal hanya pada laporan laba rugi.
2	<i>Matching principle</i> (pendapatan dan beban yang terkait diakui pada saat direalisasikan).																			Beban PPh tidak sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.

No	Kriteria (A)	Skala									Skala									Kriteria (B)
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Efek perbedaan perhitungan PPh antara komersil dan fiskal hanya pada laporan laba rugi.																			Beban PPh tidak sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.

6. Dalam pembebanan pajak penghasilan dengan metode bersih dari pajak, seberapa pentingkah hal-hal berikut ini:

No	Kriteria (A)	Skala									Skala									Kriteria (B)
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Aset, Liabilitas dan ekuitas disajikan bersih dari efek pajak.																		Non alokasi pajak tangguhan.	
2	Aset, Liabilitas dan ekuitas disajikan bersih dari efek pajak.																		Beban PPh sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.	

No	Kriteria (A)	Skala									Skala									Kriteria (B)
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Non alokasi pajak tangguhan.																		Beban PPh sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.	

7. Dalam pembebanan pajak penghasilan dengan metode alokasi parsial, seberapa pentingkah hal-hal berikut ini:

No	Kriteria (A)	Skala									Skala									Kriteria (B)
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	PPh ditanggungkan hanya meliputi perbedaan waktu periode berjalan.																		Pendapatan dan beban diakui sebesar pengakuan transaksi.	
2	PPh ditanggungkan hanya meliputi perbedaan waktu periode berjalan.																		Beban PPh tidak sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.	

No	Kriteria (A)	Skala									Skala									Kriteria (B)
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Pendapatan dan beban diakui sebesar pengakuan transaksi.																		Beban PPh tidak sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.	

8. Dalam pembebanan pajak penghasilan dengan metode alokasi intra periode, seberapa pentingkah hal-hal berikut ini:

No	Kriteria (A)	Skala									Skala									Kriteria (B)
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Pelaporan laba bersih operasi dilakukan sebelum pos-pos luar biasa.																			Semua konsekuensi pajak yang timbul dialokasikan langsung pada transaksi yang bersangkutan.
2	Pelaporan laba bersih operasi dilakukan sebelum pos-pos luar biasa.																			Beban PPh sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.

No	Kriteria (A)	Skala									Skala									Kriteria (B)
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Semua konsekuensi pajak yang timbul dialokasikan langsung pada transaksi yang bersangkutan.																			Beban PPh sama nilainya dengan utang pajak pada tahun berjalan.

9. Dalam pembebanan pajak penghasilan dengan metode non alokasi, seberapa pentingkah hal-hal berikut ini:

No	Kriteria (A)	Skala									Skala									Kriteria (B)
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Non alokasi PPh ditanggihkan, karena tidak mengandung kegunaan informasi.																			Liaibilitas PPh dan aset pajak tangguhan bergantung pada realisasi penghasilan kena pajak pada tahun mendatang.
2	Non alokasi PPh ditanggihkan, karena tidak mengandung kegunaan informasi.																			Beban PPh sama seperti beban pada umumnya, tidak ada perbedaan pengakuan komersil dan fiskal.

No	Kriteria (A)	Skala									Skala									Kriteria (B)
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Liaibilitas PPh dan aset pajak tangguhan bergantung pada realisasi penghasilan kena pajak pada tahun mendatang.																			Beban PPh sama seperti beban pada umumnya, tidak ada perbedaan pengakuan komersil dan fiskal.

Perbandingan Metode-Metode Pembebanan PPh: Efek terhadap Penyajian Laporan Keuangan

Hal	Alokasi					Non-alokasi
	Antar Periode				Intra Periode	
	Komprehensif			Parsial		
	Bersih dari Pajak	Tanggungan	Aset-Laibilitas			
Efek terhadap Penyajian Laporan Laba Rugi						
Beban PPh	PPh komersil = PPh fiskal	PPh komersil ≠ PPh fiskal	PPh komersil ≠ PPh fiskal	PPh komersil ≠ PPh fiskal	PPh komersil = PPh fiskal	PPh komersil = PPh fiskal
Jumlah Penghasilan	Penghasilan bersih setelah dikurangi konsekuensi PPh	Sebesar pengakuan transaksi	Sebesar pengakuan transaksi	Sebesar pengakuan transaksi	Penghasilan minus konsekuensi pajak.	Sebesar pengakuan transaksi
Jumlah Biaya / Beban	Biaya bersih setelah dikurangi beban PPh	Sebesar pengakuan transaksi	Sebesar pengakuan transaksi	Sebesar pengakuan transaksi	Biaya minus konsekuensi pajak.	Sebesar pengakuan transaksi
Efek terhadap Penyajian Laporan Posisi Keuangan						
PPh dibayar di muka	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada	Ada
Laibilitas PPh	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
PPh Ditangguhkan	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Besarnya Laba Bersih yang Masuk Ke Akun Laba yang Ditahan	Sama dengan laba komersil, tidak sama dengan laba fiskal.	Sama dengan laba komersil, tidak sama dengan laba fiskal.	Sama dengan laba komersil, tidak sama dengan laba fiskal.	Sama dengan laba komersil, tidak sama dengan laba fiskal.	Sama dengan laba komersil, tidak sama dengan laba fiskal.	Sama dengan laba komersil, tidak sama dengan laba fiskal.
Keterangan	Aset, Laibilitas dan Ekuitas disajikan bersih dari efek pajak.	Efek perbedaan perhitungan PPh antara komersil dan fiskal hanya pada laporan laba rugi.	PPh ditangguhkan (yang berasal dari akumulasi perbedaan waktu periode sebelumnya dan periode berjalan) diakui sebagai aset bila bersaldo debit dan sebagai laibilitas bila bersaldo kredit.	PPh ditangguhkan hanya meliputi perbedaan waktu pada periode berjalan (tanpa efek yang berasal dari periode sebelumnya). Diakui sebagai aset bila bersaldo debit dan laibilitas bila bersaldo kredit.	Semua konsekuensi Pajak yang timbul dialokasikan langsung pada transaksi yang bersangkutan.	Menganggap beban PPh sebagaimana beban pada umumnya, tidak memperhatikan perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara komersil dan fiskal.
PPh komersil	: Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan laporan laba rugi yang disusun menurut kaidah PSAK.					
PPh fiskal	: Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan perhitungan menurut ketentuan perpajakan.					

Ilustrasi Perbedaan Enam Metode Alokasi Pembebanan PPh dalam Penyajian Laporan Laba Rugi dan Laporan Posisi Keuangan

	Alokasi Komprehensif Antar Periode			Alokasi Komprehensif Intra Periode	Alokasi Parsial	Non Alokasi
	Tanggungan	Aset-Laibilitas	Bersih dari Pajak			
<i>Income Statement Approach</i>						
Penghasilan sebelum beda waktu dan PPh	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-
Perbedaan waktu ¹	(100.000,-)	(100.000,-)	(107.500,-)	(107.500,-)	(107.500,-)	(107.500,-)
Penghasilan sebelum PPh	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-	Rp 892.500,-	Rp 892.500,-	Rp 892.500,-	Rp 892.500,-
Beban PPh kini	350.000,-	350.000,-	350.000,-	350.000,-	350.000,-	350.000,-
Beban PPh tanggungan	7.500,-	7.500,-	-	-	7.500,-	-
Total beban PPh	(357.500,-)	(357.500,-)	(350.000,-)	(350.000,-)	(357.500,-)	(350.000,-)
Laba bersih	Rp 542.500,-	Rp 542.500,-	Rp 542.500,-	Rp 542.500,-	Rp 535.000,-	Rp 542.500,-
<i>Balancesheet Approach</i>						
Saldo Aset Sebelum Efek Metode Pembebanan PPh	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-
Aset PPh Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-
Saldo Aset Setelah Efek Metode Pembebanan PPh	4.900.000,-	4.900.000,-	4.550.000,-	4.900.000,-	4.900.000,-	4.900.000,-
Laibilitas Sebelum Efek Metode Pembebanan PPh	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-
Laibilitas PPh Ditangguhkan	-	7.500,-	-	-	7.500,-	-
Laibilitas Setelah Efek Metode Pembebanan PPh	Rp 2.850.000,-	Rp 2.857.500,-	Rp 2.150.000,-	Rp 2.850.000,-	Rp 2.857.500,-	Rp 2.850.000,-
Ekuitas Sebelum Efek Metode Pembebanan PPh	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-
Ekuitas Setelah Efek Metode Pembebanan PPh	Rp 2.050.000,-	Rp 2.042.500,-	Rp 2.400.000,-	Rp 2.050.000,-	Rp 2.042.500,-	Rp 2.050.000,-

¹ Diasumsikan pada tanggal 2 Januari 2014, PT. SWY membeli peralatan Rp 500.000,- umur manfaat lima tahun tanpa nilai sisa (sehingga depresiasi per tahun @ Rp 100.000,-). Metode depresiasi garis lurus digunakan untuk menyusutkan aset ini. Perhitungan depresiasi menurut pajak sebesar Rp 125.000,- per tahun (untuk umur manfaat 4 tahun, termasuk kelompok 1 menurut ketentuan depresiasi pajak). Selisih depresiasi pajak dan akuntansi adalah Rp 100.000,-, dikalikan tarif pajak tahun 2014 yaitu 30%, sama dengan Rp 30.000,- dialokasikan selama 4 tahun sebesar Rp 7.500,- sehingga perbedaan waktu bersih sebesar Rp 107.500,-.